

**BERGABUNGNYA ISRAEL DALAM ORGANIZATION FOR
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)**

TAHUN 2010

SKRIPSI



Disusun oleh

Ari Putra Prima

071112064

**PROGRAM SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap 2015/2016**

**BERGABUNGNYA ISRAEL DALAM ORGANIZATION FOR ECONOMIC
COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga



Disusun oleh
Ari Putra Prima
071112064

**PROGRAM SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap 2015/2016**

Skripsi Berjudul

“Bergabungnya Israel dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Tahun 2010”

Disusun oleh

Ari Putra Prima

071112064

Disetujui untuk diajukan pada
Sidang Akhir Skripsi
Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016

Surabaya, 17 Juni 2016

Dosen Pembimbing



M. Muttaqien, S.IP, MA, Ph.D.

NIP. 19730130 199903 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Hubungan Internasional



M. Muttaqien, S.IP, MA, Ph.D.

NIP. 19730130 199903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
Pada hari Jum'at, 15 Juli 2016 pukul 09.00 WIB
di Ruang Sidang Cakra Buana Catur Matra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
Surabaya**

Komisi Penguji

Ketua



Sartika Soesilowati, Dra., MA, Ph.D

NIP. 196407301 99512 2 001

Anggota I

A. Safril Mubah, M.Hub.Int
NIP. 19810917 201404 1 001

Anggota II

Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil
NIP. 19560507 198601 2 001

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi skripsi berjudul:

“Bergabungnya Israel dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Tahun 2010”

ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan /ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.



Surabaya, 17 Juni 2016



Ari Putra Prima
Ari Putra Prima

Untuk MAMA, ADEK DAN EYANG



PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Dengan rahmat dan hidayahNya juga penulis memiliki bekal ilmu selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mama, Adek dan Eyang untuk doanya yang tidak putus-putus. Lalu terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing yaitu Bapak Muttaqin atas bimbingannya yang luar biasa. Terimakasih juga kepada Ibu Sartika, Mas Safril dan Pak Wahyudi yang telah menguji dengan baik hati serta memberikan nilai yang memuaskan untuk penulis. Terimakasih kepada Ayu Rahmadhani yang telah ikut mengucurkan darah dan keringat dalam mendukung penulis.

Akhir kata, penulis turut mengucapkan terimakasih pada pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini. Tentu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga berbagai masukan serta kritik yang membangun akan penulis terima secara terbuka. Pada akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan mampu berkontribusi bagi banyak pihak. Terimakasih.

Surabaya, 17 Juni 2016

Ari Putra Prima

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Pertanyaan Penelitian.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Kerangka Pemikiran.....	8
I.5 Hipotesis.....	14
I.6 Metodologi.....	15
BAB II POSISI STRATEGIS OECD BAGI DUNIA INTERNASIONAL... 21	21
II.1 Posisi Strategis OECD dalam Pemerintahan Global	21
II.2 Peran OECD sebagai Media Sentralisasi.....	26
II.3 Peran <i>Independence</i> OECD.....	31
II.4 Peran OECD sebagai <i>Enforcer</i>	32
II.5 Peran OECD sebagai Pembentuk Identitas.....	37
II.6 Posisi Strategis OECD bagi Israel.....	41
BAB III INSENTIF BERGABUNGNYA ISRAEL KE DALAM OECD... 44	44
III.1 Upaya Israel untuk bergabung dalam OECD.....	44
III.2 Keuntungan <i>Transaction Cost</i> dalam OECD.....	47
III.3 Membaiknya Kondisi Sosial-Ekonomi Israel setelah Bergabung dalam OECD tahun 2010-2013.....	49
III.3.1 Kondisi Sosial-Ekonomi Israel sebelum Bergabung dalam OECD.....	50
III.3.2 Kondisi Ekonomi-Sosial Israel setelah Bergabung dalam OECD	55
BAB IV REPUTASI ISRAEL SETELAH BERGABUNG DALAM OECD. 59	59
IV.1 Israel dalam Hubungan Internasional	59
IV.2 Membaiknya Reputasi Israel di Dunia Internasional.....	62
IV.3 Implikasi Bergabungnya Israel dalam OECD terhadap Reputasi Israel.....	63
BAB V KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

TABEL

Tabel II.1.1 Daftar Negara Anggota OECD.....	22
--	----

GAMBAR

Gambar II.2.1 Cara Kerja OECD.....	26
------------------------------------	----

Gambar II.2.2 Struktur Organisasi OECD.....	29
---	----

Gambar II.4.1 Area Bidang Kerja dalam OECD.....	34
---	----

GRAFIK

III.3.1.1 Grafik <i>Income Poverty Rates</i> Israel dan OECD.....	52
---	----

III.3.2.1 Grafik <i>Income Poverty Rate</i> tahun 2013.....	56
---	----



DAFTAR SINGKATAN

BEM	: Big Emerging Markets
FDI	: Foreign Direct Investment
OEEC	: Organization for European Economic Cooperation
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development



ABSTRAK

Bergabungnya Israel ke OECD pada tahun 2010 dinilai kontroversial karena Israel dinilai masih belum mampu menyesuaikan diri dengan anggota-anggota OECD lainnya yang memiliki reputasi baik dalam sektor ekonomi maupun demokrasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Israel masih memiliki permasalahan dari sektor perekonomian, sektor politik dan sektor kesejahteraan masyarakatnya, serta keterlibatan Israel dalam konflik-konflik regional, yang kemudian membentuk reputasi Israel secara negatif di ranah internasional. Meski demikian, Israel tetap berupaya untuk bergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. OECD sendiri berdiri pada tahun 1961 yang saat ini berlokasi di Perancis dan memiliki 35 negara anggota yang terdiri dari negara-negara maju. Organisasi ini bergerak dalam bidang ekonomi dan bidang sosial yang tujuannya adalah mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kondisi ekonomi dan kondisi sosial baik negara-negara anggota maupun non-anggota. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dampak dari bergabungnya Israel dalam OECD pada tahun 2010. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan teori *rational design* dengan menganalisis insentif-insentif yang ditawarkan organisasi internasional kepada negara anggotanya. Pada akhirnya, penulis menemukan bahwa setelah bergabung dengan OECD, dari tahun 2010 hingga tahun 2013, Israel telah memperoleh insentif berupa terminimalisasinya *transaction cost* bagi Israel untuk mencapai kepentingan ekonominya dan membaiknya reputasi Israel di ranah internasional yang berimplikasi positif terhadap hubungan diplomatik Israel.

Kata Kunci: Israel, OECD, Organisasi Internasional, Insentif Organisasi Internasional

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Israel merupakan negara yang berdiri di Timur Tengah pada tahun 1948. Pasca perang dunia pertama wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman jatuh ke pihak Barat yaitu Inggris, sehingga Israel dapat memperoleh kemerdekaan. Israel merdeka berdasarkan bantuan dari Inggris yang secara otomatis menuai protes dari negara-negara yang bergabung dengan Liga Arab (Reinhart, 2002). Semasa berdirinya, negara Israel tidak pernah lepas dari konflik dengan negara tetangganya seperti Palestina, Arab dan Mesir. Meski demikian, Israel memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara *superpower* yaitu Amerika Serikat (Morris, 2002). Saat ini Israel memiliki hubungan diplomatik dengan 160 negara di dunia antara lain adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Turki, Jerman dan India.

Pada tahun 1994, Israel telah berniat untuk bergabung dengan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (OECD, 2016). Saat itu, Israel masih berstatus sebagai negara pengamat yang hanya dapat melakukan observasi kegiatan yang dilakukan oleh OECD. Pada kurun waktu tahun 1994 hingga 2007, Israel membuat panitia tersendiri dalam rangka menunjukkan keseriusannya untuk bergabung dengan OECD. Pada tahun 2007, Israel menyerahkan proposal permohonan atau *roadmap* untuk menjadi anggota tetap OECD. Dalam menanggapi hal tersebut, Angel Guria selaku Sekretaris Jendral

OECD melakukan dialog dengan Menteri Keuangan Israel, Yuval Stenitz dan Gubernur Bank Israel, Stanley Fisher untuk mempertimbangkan masuknya Israel ke OECD. Pada tahun 2010, Israel diterima menjadi anggota tetap OECD setelah masa pemantauan kurang lebih tiga tahun (OECD, 2016).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sendiri telah berdiri sejak tahun 1961 yang bermarkas di Perancis. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. OECD sejatinya dibentuk sebagai wadah untuk para pemerintah negara yang tergabung dalam OECD untuk melakukan diskusi tentang ekonomi, masalah sosial negaranya, dan menjadi wadah bagi negara anggota OECD untuk berbagi pengalaman serta mencari solusi untuk masalah-masalah umumnya terkait dengan kebijakan dalam sektor ekonomi.

Ciri khas yang utama dari OECD adalah bagaimana organisasi ini dapat mengukur produktivitas negara dan perdagangan global serta investasi. Selain itu, organisasi ini juga mampu menganalisis dan membandingkan data untuk memprediksi tren yang akan terjadi di masa yang akan datang. Umumnya, negara-negara yang tergabung dalam OECD merupakan negara-negara yang telah memiliki perekonomian yang kuat dan dipertimbangkan sebagai negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat (OECD, 2016).

Proses masuknya Israel ke dalam OECD pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keadaan Israel sebelum diterima keanggotannya dalam OECD yang sempat dinilai kontroversial. Sebelumnya, Israel sempat diragukan ketika

memutuskan untuk bergabung ke dalam OECD karena reputasi Israel yang buruk di wilayah Timur Tengah dan hubungan Israel yang buruk dengan negara-negara Arab Islam. Hal ini disebabkan keadaan Israel yang penuh dengan konflik, khususnya konfliknya dengan Palestina seputar perbatasan, pelanggaran HAM, dan lain-lain.

Keputusan Israel untuk bergabung ke OECD oleh karenanya mendapat kritik dari ranah internasional karena Israel dinilai tidak memiliki kredibilitas untuk menjadi anggota OECD. Hal ini dikarenakan adanya penilaian bahwa Israel dianggap tidak cukup demokratis dan telah melanggar hukum internasional karena telah mengokupasi wilayah Palestina (Kara, 2014).

Dengan bergabungnya Israel ke OECD, hal tersebut dianggap telah mengubah Israel dari negara petani sosialis menjadi negara yang mengalami proses kemajuan yang mampu mengalahkan bahkan meninggalkan negara-negara di sekitarnya. Selain itu, aksi invasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina juga menjadi perhatian utama. Hal ini dibuktikan dengan kritik-kritik yang muncul seiring dengan semakin melebarnya wilayah Israel sehingga wilayah Palestina perlahan-lahan menjadi bagian dari Israel. Tentu saja dengan terjadinya hal ini, bergabungnya Israel ke dalam OECD kemudian dianggap sebagai langkah OECD termasuk negara-negara anggotanya untuk melegalkan invasi ke wilayah Palestina. Selain itu, bergabungnya Israel ke dalam OECD juga sekaligus merusak reputasi OECD yang dianggap telah memihak Israel dalam konflik-konflik yang melibatkan Israel, sehingga secara otomatis OECD dinilai tidak dapat berperan secara netral.

Kritik-kritik yang muncul terhadap bergabungnya Israel ke OECD diakibatkan oleh adanya asumsi bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip dari Konvensi OECD, di antaranya adalah (1) menghindari adanya perkembangan ekonomi yang mampu membahayakan perekonomian negara lain dan (2) mengurangi atau melarang hambatan terhadap pertukaran barang dan jasa. Kedua prinsip tersebut bertentangan dengan tindakan Israel terhadap Palestina di mana Israel melakukan blokade terhadap jalur Gaza dan juga mengokupasi wilayah West Bank pada tahun 2008 hingga 2009 (Kara, 2014).

Blokade terhadap jalur Gaza secara otomatis berakibat pada stagnasinya distribusi makanan, pertukaran barang dan jasa, minyak dan gas ataupun persediaan kebutuhan medis. Tindakan tersebut tentu saja tak hanya memperlihatkan adanya pelanggaran HAM namun juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Palestina, lebih luas lagi terhadap stabilitas wilayah Timur Tengah. Sementara okupasi Israel ke wilayah West Bank bertentangan dengan prinsip OECD bahwa negara anggota tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ekonomi di luar teritori negara yang bersangkutan. Kontradiksi tindakan Israel dengan prinsip-prinsip OECD ini kemudian menunjukkan bahwa Israel pada dasarnya tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan diri sebagai anggota OECD. Tindakan Israel terhadap Palestina ini juga memunculkan kritik dari ranah internasional.

Sementara, dilihat dari permasalahan teknis, Israel juga dianggap belum mampu menyamai posisi ekonomi negara-negara anggota OECD lainnya. Seperti yang diketahui, negara-negara yang tergabung dalam OECD adalah negara-negara

demokrasi yang memiliki perekonomian yang maju sehingga dipertimbangkan sebagai negara maju. Berkebalikan dengan hal tersebut, secara teknis, pada kurun waktu 2007-2010, Israel dianggap belum mampu menangani permasalahan ekonomi yang ada di dalam negara. Di antaranya adalah permasalahan tingginya angka korupsi, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual yang salah satunya dilakukan industri farmasi di Israel. Permasalahan semacam ini turut menjadi perhatian bagi negara-negara anggota OECD lainnya seperti Australia.

Selain itu, keputusan Israel untuk masuk dan bergabung dengan OECD ini juga bertolak belakang dengan keadaan Israel yang diliputi dengan instabilitas ekonomi. Pasalnya, Israel dikenal sebagai negara yang memiliki rekor buruk dalam hal perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka korupsi, kurangnya standar pendidikan yang diberikan, serta kesenjangan sosial yang terjadi (Kara, 2014). Kasus korupsi Israel yang menyita perhatian Bank Dunia adalah penggelapan pajak negara dan penipuan terhadap perusahaan-perusahaan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Perdana Menteriya saat itu Ehud Olmert yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2009 (Sahar, 2016).

Tingginya kasus korupsi di Israel membuat negara ini menempati peringkat 34 negara ter-korup di dunia pada tahun 2006, dengan skala sebesar 5,9, sementara pada tahun 2007, Israel menempati peringkat 30, pada tahun 2008 menempati peringkat 33, dan pada tahun 2009 menempati peringkat 32 menurut data dari The Global Corruption Perception Index Rank yang mensurvei 178 negara di dunia (Corruption Perception Index, 2010).

Israel juga memiliki masalah berupa kurangnya pendidikan yang ditunjukkan dalam data laporan OECD pada tahun 2004. Pada laporan tersebut, diperlihatkan bahwa peringkat pelajar di Israel rata-rata berada jauh di bawah anggota OECD, yakni tepatnya 90% dari pelajar di Israel rata-rata memiliki peringkat di bawah negara-negara OECD lainnya (Shlaim & Mohun, 2010). Data laporan tersebut, menunjukkan bahwa Israel memiliki permasalahan yang cukup serius dalam bidang kesenjangan pendidikan, dan oleh karenanya harus meminimalisir kurangnya pendidikan yang terjadi di negara mereka (Kara, 2014).

Selanjutnya, Israel juga dihadapkan dengan masalah kesenjangan sosial antar penduduknya yaitu antara kaum Yahudi dan kaum non-Yahudi. Keuntungan pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata antar warganya. Selain itu pekerja luar negeri yang bekerja di Israel juga mengalami kemiskinan yang sama. Berdasarkan data yang dihimpun OECD, sebanyak lebih dari 50% penduduk Israel hidup di bawah garis kemiskinan (Kara, 2014).

Keadaan perpolitikan Israel yang kontroversial serta kondisi ekonomi Israel yang kurang mumpuni dengan tingginya angka korupsi, rendahnya pendidikan, dan tingginya angka kesenjangan sosial kemudian menunjukkan bahwa Israel pada dasarnya sebelum bergabung dengan OECD, Israel masih berada dalam kondisi perpolitikan maupun perekonomian yang tidak stabil (Kara, 2014). Selain itu, bergabungnya Israel ke OECD pada tahun 2010 juga dinilai kontroversial karena kondisi Israel yang masih bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diterapkan OECD. Kondisi ini lah yang lantas menimbulkan pertanyaan terhadap bagaimana kemudian dampak yang diperoleh Israel setelah

bergabung dalam OECD pada tahun 2010. Hal ini dapat diteliti dengan menelaah insentif-insentif yang diperoleh Israel ketika Israel bergabung ke dalam keanggotaan OECD.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa apa dampak yang diperoleh Israel setelah bergabung dengan OECD pada tahun 2010 bagi kondisi perpolitikan maupun perekonomian Israel yang sebelumnya dinilai memiliki kondisi perpolitikan yang kontroversial serta memiliki banyak kekurangan berupa tingginya angka korupsi, kesenjangan sosial dan pendidikan yang masih rendah?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan dampak yang diperoleh Israel setelah bergabung dengan OECD pada tahun 2010. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis juga bertujuan untuk menganalisis fungsi-fungsi organisasi internasional yang dapat menawarkan insentif-insentif bagi negara anggotanya. Melalui analisis terhadap hal tersebut, penulis juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi internasional bekerja, khususnya melalui pandangan Israel sebagai aktor yang rasional. Oleh karenanya, berdasarkan tujuan tersebut, penulis menggunakan teori *rational design* dan juga berbagai analisis terkait fungsi-fungsi organisasi internasional yang menyediakan insentif bagi negara untuk bergabung ke dalam organisasi internasional.

I.4 Kerangka Teori

Dalam perspektif liberalisme, negara memandang organisasi internasional sebagai media kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional dipercaya mampu menjadi wadah bagi negara-negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Hal ini bertentangan dengan perspektif realisme yang beranggapan bahwa negara merupakan satu-satunya aktor dalam tatanan internasional, yakni sebagai *self-interested actor* (Dunne, 2001:3). Liberalisme melihat bahwa dalam tatanan internasional terdapat fenomena transnasionalisme yang terjadi karena adanya interdependensi antar negara dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor perekonomian yang semakin mengglobal.

Meski interdependensi ini kemudian secara tidak langsung mengurangi kedaulatan negara untuk bertindak, namun, dalam perspektif liberalisme negara-negara justru diharapkan mampu mengelola ketergantungan tersebut dalam sebuah kerjasama yang dapat diwadahi oleh organisasi internasional. Kerjasama dalam organisasi internasional dapat dilakukan oleh lebih dari dua negara yang memiliki tujuan bersama. Melalui kerjasama dalam organisasi internasional, maka negara-negara yang memiliki hubungan saling ketergantungan dapat membangun struktur terhadap relasi antar negara secara lebih tertata (Abbott & Snidal, 1988:5).

Dalam hubungan internasional, kerjasama negara-negara juga terjadi di bawah kondisi anarki. Artinya, alasan utama negara-negara untuk bekerjasama

tetap didasarkan pada kepentingan rasional negara. Sebagai aktor yang rasional, negara tetap memiliki kepentingan nasional yang menjadi dasar negara untuk bertindak. Dalam kondisi anarki, organisasi internasional dapat mendorong aktivitas kerjasama melalui didorongnya sentralisasi. Keinginan negara-negara untuk melakukan kerjasama dalam organisasi internasional dapat dipahami melalui teori *rational design* (Koremenos et.al, 2001). Dalam teori tersebut, rasionalitas negara diperlihatkan melalui penggunaan diplomasi dan konferensi untuk memilah fasilitas institusi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan kolektif. Negara dalam hal ini dapat membuat institusi yang baru atau memodifikasi institusi yang telah ada.

Berdasarkan teori *rational design*, institusi harus mampu menyediakan insentif yang kompatibel bagi kebutuhan negara. Dengan adanya insentif tersebut, maka aktor-aktor negara dapat mengubah maupun mengikuti institusi karena institusi yang diikuti memiliki tujuan yang selaras dengan kepentingan negara. Meski demikian, insentif yang sesuai dengan kepentingan negara tidak akan selalu diikuti dengan kepatuhan negara terhadap regulasi-regulasi institusi dan negara-negara juga tidak akan selalu mendapatkan keuntungan dari institusi yang diikuti (Koremenos et.al, 2001).

Secara rasional, negara akan bergabung dalam sebuah organisasi internasional karena organisasi internasional dapat menjadi kendaraan bagi negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kerangka kerjasama. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan berbagai insentif bagi negara seperti mencapai *collective goods*, pengelolaan permasalahan *prisoner*

dilemma, permasalahan koordinasi, dan lain-lain. Selain itu, organisasi internasional juga menawarkan berbagai kelebihan yang dapat menguntungkan negara (Abbott & Snidal, 1988:7).

Pertama, adalah kemampuan organisasi internasional untuk menjadi instrumen sentralisasi (Abbott & Snidal, 1988:6).¹ Fungsi ini merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk memberikan efisiensi bagi negara untuk mencapai tujuannya. Peralnya, organisasi internasional mampu memfasilitasi negara-negara untuk melakukan negosiasi dan implementasi persetujuan, penyelesaian persengketaan, manajemen konflik, dan berbagai aktivitas teknis seperti pengembangan norma internasional, bantuan teknis antar negara, dan lain-lain.

Dalam fungsi-fungsi tersebut, instrumen sentralisasi yang dimaksud adalah kemampuan organisasi internasional untuk melakukan aktivitas kolektif yang kongkret, terstruktur, stabil, dan memiliki aparatur administratif yang suportif (Abbott & Snidal, 1988:8). Maka dari itu, organisasi internasional dianggap dapat mendukung interaksi antar negara, bahkan antar aktor non negara, dan melakukan aktivitas operasional secara terpusat. Oleh karenanya, organisasi internasional dapat menjadi wadah forum yang stabil yang dinilai memiliki posisi netral secara politis.

Dalam sudut pandang birokratis, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk memajemen operasi substantif karena organisasi internasional memiliki peran sebagai agen yang memiliki biaya dan struktur

¹ Sentralisasi disini berarti derajat. Tidak hanya dalam organisasi internasional tetapi juga antara organisasi internasional.

birokrasi (Abbott & Snidal, 1988:8). Selanjutnya, dalam fungsi sentralistik, organisasi internasional juga dapat bekerja sebagai media *pooling*, yakni suatu kemampuan organisasi internasional untuk mengumpulkan aktivitas dan aset. Kemudian, organisasi internasional juga memiliki fungsi *joint production*, yang merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk memudahkan pembentukan *teamwork* dan *monitoring*, yang mana negara-negara anggota semakin mudah untuk dilibatkan dalam suatu kerangka kerjasama. Terakhir, sentralisasi juga merujuk pada fungsi organisasi internasional sebagai wadah bagi elaborasi norma dan koordinasi. Artinya, organisasi internasional dapat menjadi forum bagi terciptanya norma tertentu melalui koordinasi secara teknis. Dalam hal ini, organisasi berfungsi sebagai perpanjangan dari fungsi legislatif (Abbott & Snidal, 1988:13).

Kedua, adalah fungsi *independence* (Abbott & Snidal, 1988:16). Meskipun organisasi internasional bekerja sebagai forum bagi negara-negara untuk bekerjasama, namun, negara masih memiliki otonomi untuk menentukan keputusannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan yang dimiliki negara untuk mendeterminasi tindakannya dalam interaksi antar negara. Ini juga berlaku bagi organisasi internasional yang memiliki posisi sebagai lembaga independen yang netral.

Dalam fungsi *independence*, organisasi internasional memberikan dukungan terhadap interaksi langsung antar negara. Melalui dukungan ini, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda negosiasi antar negara. Selain itu, organisasi internasional juga memiliki

komunitas epistemik yang dapat mengembangkan ide dan membantu negara untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi negara. Meski demikian, dalam pengembangan ide mapupun pemecahan masalah, organisasi internasional tetap bekerja secara netral (Abbott & Snidal, 1988:23).

Ketiga, adalah fungsi organisasi internasional sebagai perwakilan dan *enforcer* (Martin, 1992:766). Sebagai perwakilan maupun *enforcer*, organisasi internasional mampu mewakili nilai-nilai yang ada dalam komunitas dan norma-norma yang dibentuk dalam organisasi internasional. Sementara, sebagai *enforcer*, organisasi internasional memiliki fungsi untuk memastikan kepatuhan negara terhadap komitmen yang telah ditentukan dalam organisasi internasional. Kesemua fungsi tersebut kemudian memperlihatkan kemampuan organisasi internasional untuk mengurangi *transaction cost* bagi negara untuk mencapai tujuannya berdasarkan kepentingan nasionalnya (Martin, 1992:776).

Keempat, adalah fungsi organisasi internasional sebagai pembentuk identitas. Dalam hal ini, organisasi internasional berperan dalam membentuk perilaku negara anggotanya. Konstruksi atas perilaku ini merefleksikan identitas organisasi internasional yang secara otomatis juga membentuk identitas dari negara anggota sebagai anggota organisasi internasional tertentu yang menganut nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi internasional yang diikutinya (Porter & Webb, 2007:4). Peran organisasi internasional sebagai pembentuk identitas dapat dianalisis melalui pendekatan konstruktivis di mana organisasi internasional memiliki peran dalam membangun identitas melalui proses produksi

fakta sosial yang berkaitan dengan identitas, nilai-nilai, dan kalkulasi rasional dalam mengukur pengaruh dari organisasi internasional.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh organisasi internasional tersebut, maka jelas bahwa organisasi internasional menyediakan insentif yang dapat dimanfaatkan oleh negara. Dalam hal ini, keinginan Israel untuk bergabung dalam OECD mencerminkan keinginan Israel untuk menjadikan OECD sebagai media sentralisasi yang mampu menjadi fasilitator bagi Israel untuk mencapai tujuannya, berupa perbaikan dalam sektor perekonomian. Selain itu, OECD sebagai media sentralisasi, OECD juga mendukung didorongnya interaksi antar negara yang kemudian dapat memotong biaya transaksi yang dikeluarkan Israel. OECD juga dijadikan Israel sebagai instrumen sentralisasi, karena dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota lainnya dengan mudah dan biaya yang sedikit.

Lebih lanjut, Israel juga dapat menjadikan OECD sebagai lembaga yang mampu membentuk identitas negara anggotanya sebagai negara-negara demokratis dengan perekonomian maju. Berkaitan dengan hal tersebut, OECD merupakan organisasi internasional yang dikenal memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan kebebasan ekonomi, sehingga dengan bergabungnya Israel ke OECD maka Israel mampu membentuk identitasnya sebagai negara yang terbuka dalam hal perekonomian.

Israel dengan demikian menjadikan organisasi internasional ini sebagai sarana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan lebih jauh dalam memperbaiki reputasinya di ranah internasional yang selanjutnya dapat

membuka akses bagi Israel untuk memiliki hubungan dengan negara-negara lain yang secara otomatis dapat berdampak positif terhadap reputasi Israel dalam ranah internasional. Dengan bergabungnya Israel dalam OECD dapat meningkatkan kepercayaan dari negara lain bahwa Israel merupakan negara dengan orientasi untuk maju ke depan sehingga banyak negara-negara menjalin hubungan dengan Israel baik dalam hal kerjasama maupun kolaborasi.

I.5 Hipotesis

Dalam menjawab rumusan masalah apa dampak yang diperoleh Israel setelah bergabung dengan OECD pada tahun 2010 bagi kondisi perpolitikan maupun perekonomian Israel yang sebelumnya dinilai memiliki kondisi perpolitikan yang kontroversial serta memiliki banyak kekurangan berupa tingginya angka korupsi, kesenjangan sosial dan pendidikan yang masih rendah, penulis mengajukan hipotesis bahwasanya Israel mengajukan diri sebagai anggota OECD dikarenakan oleh faktor-faktor berikut, yakni (1) adanya insentif yang didapat Israel berupa pengurangan *transaction cost* dalam mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya kepentingan dalam sektor ekonomi dan (2) adanya keterbukaan terhadap hubungan antar negara-negara yang tergabung dalam OECD yang dianggap mampu menguntungkan Israel dalam memperbaiki reputasi Israel dalam ranah internasional, dalam hal ini Israel mampu mendapat pengakuan internasional lebih luas dan mampu membuka hubungan diplomatik secara lebih luas juga.

I.6 Metodologi

I.6.1 Operasionalisasi Konseptual

1.6.1.1 Konsep Kepentingan Ekonomi

Dalam mendefinisikan kepentingan ekonomi, perlu dipahami makna ekonomi terlebih dahulu. David Ricardo dan Robert Solow mendefinisikan ekonomi sebagai mesin yang menghasilkan *output* yang diproduksi dari input berupa *labor*, *land*, dan *equipment* (Feldman, 2014). Pertumbuhan terjadi ketika terdapat peningkatan dalam *output*. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika terdapat penambahan dalam input atau adanya penggunaan inovasi dan teknologi yang dapat menambah efisiensi dalam aktivitas produksi. Kepentingan ekonomi merujuk pada kepentingan negara untuk memacu pertumbuhan ekonominya dan berbagai insentif yang berkaitan dengan bertambahnya keuntungan ekonomi bagi negara.

Dalam kasus bergabungnya Israel ke dalam OECD, kepentingan ekonomi dapat menjadi motif bagi Israel untuk memutuskan bergabung dalam OECD. Pasalnya, OECD merupakan organisasi yang bergerak dalam sektor ekonomi dan memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi negara-negara anggotanya. OECD menjadi fasilitator bagi negara untuk memastikan kelancaran pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara anggotanya yang mana hal ini dapat menjadi insentif bagi Israel ketika Israel tergabung dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan OECD dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh Israel.

1.6.1.2 Konsep *Transaction Cost* dalam Organisasi Internasional

Definisi *transaction cost* menurut Keohane (1960) berdasarkan Coase Theorem, mengacu pada hal yang menjadi insentif utama bagi negara ketika bergabung dalam organisasi internasional adalah berkurangnya biaya sosial antar negara untuk berinteraksi satu sama lain. Biaya sosial yang dimaksud mengacu pada biaya yang berkaitan dengan berbagai modal bagi negara untuk berinteraksi satu sama lain (Keohane, 1982:4). Dalam hal ini, organisasi internasional memfasilitasi sistem yang legal, menyediakan informasi bagi negara-negara anggotanya maupun negara non anggota, dan tidak memakan biaya transaksi (Keohane, 1982:5).

Dengan bergabungnya Israel ke dalam OECD maka Israel dapat membuat biaya transaksi yang dikeluarkan lebih efisien untuk berinteraksi dengan negara-negara yang lain. Selain itu, Israel juga bisa mendapatkan informasi seputar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diperolehnya informasi tersebut maka Israel dapat memperbaiki dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.

1.6.1.3 Konsep Hubungan Diplomatik

Menurut konvensi Wina terkait relasi diplomatik (1961) yang dimaksud dengan hubungan diplomatik adalah hubungan antara dua negara atau lebih di mana setiap negara mengirimkan perwakilannya untuk merepresentasikan negaranya masing-masing. Sehingga kedua negara dapat menjalin kerja sama melalui representatif terlebih dahulu. Dengan terciptanya hubungan yang baik maka negara tersebut dapat mencapai tujuan bersama (Konvensi Wina, 1961).

Dalam kasus ini, Israel bergabung dengan OECD karena dengan masuknya Israel ke dalam OECD, maka OECD akan mampu membuka akses diplomatik yang lebih luas lagi sehingga perkembangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Israel dapat terpenuhi. Israel juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dari negara lain yang ingin berinvestasi di Israel. Dengan masuknya investasi di Israel secara otomatis menimbulkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

1.6.1.4 Konsep Reputasi Internasional

Dalam hubungan internasional, yang dimaksud dengan reputasi internasional merujuk pada eksplanasi terkait fungsionalisme rasional yang dapat mendorong negara sebagai aktor internasional untuk melakukan kerjasama internasional (Phelan, 2009:2). Menurut William Phelan (2009), reputasi merupakan salah satu bagian dari kepentingan negara yang menjadi dasar tindakan negara untuk mematuhi komitmen-komitmen yang ada dalam hubungan internasional di bawah kondisi yang anarki. Oleh karenanya, berdasarkan adanya kepentingan terhadap reputasi internasional ini, maka kerjasama di antara negara-negara yang masing-masing memiliki kepentingan nasionalnya sendiri dapat membentuk suatu kerjasama internasional.

Berangkat dari definisi tersebut, dalam kasus bergabungnya Israel ke dalam OECD menggambarkan adanya keterbukaan Israel untuk mematuhi berbagai komitmen yang ada di dalam OECD yang direfleksikan dari keinginan Israel untuk bergabung dalam OECD. Hal ini didasarkan oleh kepentingan Israel

untuk memperbaiki reputasinya dalam ranah internasional. Pasalnya, reputasi yang baik mencerminkan adanya kepercayaan internasional terhadap Israel sebagai salah satu negara dalam hubungan internasional. Dengan reputasinya yang baik, maka Israel juga dapat mendorong adanya kerjasama dengan negara-negara lainnya meski Israel sendiri memiliki kepentingan nasional.

1.6.2 Tipe Penelitian

Terdapat beberapa macam tipe riset dan penelitian berdasarkan tujuannya antara lain penelitian eksploratori, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatori dan penelitian komparatif (Silalahi, 2006). Di mana masing-masing penelitian memiliki tujuannya masing-masing seperti penelitian eksploratori yang bertujuan untuk mengenal gejala sosial. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail mengenai sebuah fenomena. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe eskplanatori karena penulis berusaha menjelaskan dua variabel antara Israel dan organisasi internasional (OECD). Penelitian eksplanatori ini juga ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dengan pertanyaan “apa”.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus adalah analisis sudut pandang pemerintahan Israel terhadap OECD sehingga Israel ingin menjadi anggota tetap

dalam OECD. Penulis menggunakan jangkauan waktu mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2013, tepatnya pada saat Israel mengirimkan roadmap sebagai langkah untuk menjadi anggota tetap kepada OECD dan akhirnya pada tahun 2010 Israel diterima menjadi anggota tetap OECD dan setelah diterimanya Israel hingga tahun 2013 untuk menganalisis keuntungan-keuntungan yang telah didapatkan Israel selama menjadi anggota OECD.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan data. Data digunakan dalam penelitian sebagai penguat dan memperjelas penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis merupakan pengumpulan data sekunder (Hart, 2001:2), yaitu teknik mengumpulkan data melalui studi literatur dan mengumpulkan melalui hasil wawancara dari suatu sumber baik dalam bentuk media atau buku. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan karena menjadi satu bagian yang esensial dalam suatu penelitian.

I.6.5 Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Artinya, penelitian ini merujuk kepada interpretasi dari data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder yang kemudian dikaitkan dengan kasus penulis yang sebelumnya sudah menentukan teori dan konsepnya terlebih dahulu (Silverman, 2006:327). Analisis data secara kualitatif ini meliputi tiga rangkaian

kegiatan yang penting yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau yang biasa disebut dengan verifikasi.

I.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian berjudul “Bergabungnya Israel dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada Tahun 2010” dibagi ke dalam lima bagian. *Bagian pertama* berisikan secara garis besar terhadap penelitian ini. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. *Bagian kedua* berisikan tentang pembahasan posisi strategis OECD sebagai organisasi internasional yang dinilai dapat menguntungkan negara anggotanya, khususnya Israel. *Bagian ketiga* berisikan tentang pembahasan analisis insentif yang didapatkan Israel dengan bergabungnya Israel dengan OECD khususnya insentif terhadap kepentingan ekonomi dan sektor sosial Israel. *Bagian keempat* berisikan tentang implikasi bergabungnya Israel ke dalam OECD terhadap reputasi Israel dalam ranah internasional. *Bagian kelima* berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian lebih lanjut.

BAB II

POSISI STRATEGIS OECD BAGI DUNIA INTERNASIONAL

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai posisi strategis OECD dalam dunia internasional sehingga OECD dianggap akan menguntungkan Israel. Posisi strategis OECD mengacu pada fungsi OECD sebagai organisasi internasional yang dapat menjadi fasilitator bagi negara anggotanya untuk mencapai tujuannya. Posisi strategis ini diperlihatkan dari fungsi-fungsi yang dapat ditawarkan oleh OECD sebagai organisasi internasional. Analisis terhadap posisi strategis OECD baik secara internasional maupun terhadap negara anggotanya kemudian akan menunjukkan pentingnya OECD bagi Israel, sehingga hal tersebut akan mampu menarik Israel secara rasional untuk bergabung ke dalam OECD.

II.1 Posisi Strategis OECD dalam Pemerintahan Global

Sebelum terbentuk menjadi OECD, organisasi internasional ini sebenarnya telah dibangun sejak tahun 1948 dengan nama The Organization for European Economic Co-operation (OEEC) yang memiliki fungsi untuk menjalankan bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Eropa melalui Marshall Plan yang ditujukan untuk merekonstruksi Eropa dari kerugian yang didapatkan melalui perang dunia. Kesuksesannya kemudian memunculkan prospek bagi dibangunnya organisasi serupa namun dalam level yang lebih mendunia.

Hal ini ditandai dengan bergabungnya Amerika Serikat dan Kanada dalam keanggotaan OEEC yang kemudian membentuk konvensi OECD pada tahun 1960

sehingga memungkinkan terjadinya ekspansi keanggotaan OECD. OECD pada akhirnya terbentuk secara resmi pada tahun 1961, ketika Konvensi OECD mulai diterapkan. Hingga saat ini, OECD telah memiliki 35 anggota yang terdiri dari sejumlah negara maju di seluruh dunia tidak hanya Eropa dan Amerika Serikat sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel II.1.1 (OECD, 2016).

Tabel II.1.1 Daftar Negara Anggota OECD

No	Country	Date	No	Country	Date
1	Australia	7-Jun-71	21	Luxembourg	7-Dec-61
2	Austria	29-Sep-61	22	Mexico	18-May-94
3	Belgium	13-Sep-61	23	Netherlands	13-Nov-61
4	Canada	10-Apr-61	24	New Zealand	29-May-73
5	Chile	7-May-10	25	Norway	4-Jul-61
6	Czech Republic	21-Dec-95	26	Poland	22-Nov-96
7	Denmark	30-May-61	27	Portugal	4-Aug-61
8	Estonia	9-Dec-10	28	Slovak Republic	14-Dec-00
9	Finland	28-Jan-69	29	Slovenia	21-Jul-10
10	France	7-Aug-61	30	Spain	3-Aug-61
11	Germany	27-Sep-61	31	Sweden	28-Sep-61
12	Greece	27-Sep-61	32	Switzerland	28-Sep-61
13	Hungary	7-May-96	33	Turkey	2-Aug-61
14	Iceland	5-Jun-61	34	United Kingdom	2-May-61
15	Ireland	17-Aug-61	35	United States	12-Apr-61
16	Israel	7-Sep-10			
17	Italy	29-Mar-62			
18	Japan	28-Apr-64			
19	South Korea	12-Dec-96			
20	Latvia	1-Jul-16			

Sumber: OECD. 2016. List of OECD Member List. <
<http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm>>

OECD dibentuk berdasarkan keinginan negara anggotanya untuk menganalisis dan mendiskusikan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terdapat lima nilai dasar yang dimiliki OECD sebagai organisasi internasional, yakni (1) *objective*, yakni OECD memberikan analisis dan rekomendasi secara independen dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan; (2) *open*, OECD mengedepankan keterbukaan dalam diskusi dan berbagi pemahaman terkait isu global; (3) *bold*, OECD mendorong negara-negara anggotanya untuk berinovasi; (4) *pioneering*, OECD mengidentifikasi dan memprediksi tantangan-tantangan yang akan datang serta memberikan solusi terkait tantangan-tantangan tersebut, dan yang terakhir (5) *ethical*, OECD dibangun berdasarkan nilai-nilai fundamental yakni kepercayaan, integritas, dan transparansi. Kelima nilai dasar tersebut lantas membentuk identitas OECD sebagai organisasi internasional yang memiliki peran vital dalam hubungan internasional (OECD, 2016).

OECD pada dasarnya telah memiliki reputasi sebagai organisasi internasional yang kredibel dalam menangani masalah umum yang terjadi di negara-negara demokrasi. Dalam hal ini, OECD menyediakan forum di mana negara-negara anggotanya dapat membandingkan ide-ide dan saling betukar pengalaman antara satu sama lain, memprediksi tren kebijakan yang akan terjadi di masa depan, dan mengedepankan keputusan dan rekomendasi dalam semua area pembuatan kebijakan. Selain itu OECD juga merupakan organisasi internasional yang dinamis, artinya OECD senantiasa melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang akan datang seperti pada era globalisasi.

OECD merupakan fasilitator bagi negara anggota dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam mempromosikan reformasi struktural di sektor ekonomi, OECD berperan membantu negara dalam mengurangi biaya yang dibutuhkan negara apabila melakukan reformasi struktural secara mandiri. Pada dasarnya OECD menyediakan analisis data statistik dan konten kebijakan yang mampu membantu negara untuk mendapatkan informasi yang benar. Kesuksesan OECD dalam membantu negara-negara dalam memperbaiki kondisi ekonomi diperlihatkan dengan keberhasilan Spanyol, Irlandia dan Finlandia dalam meningkatkan lapangan pekerjaan berdasarkan rekomendasi dari *OECD Job Strategy* (OECD, 2016).

Dalam ranah global, OECD dideskripsikan sebagai '*rich man's club*' atau sebagai organisasi *think tank* internasional atau bahkan sebagai *shared state apparatus*. Berbeda dengan IMF dan World Bank, OECD pada dasarnya tidak memiliki kekuatan dalam mendorong kepatuhan negara-negara terhadap persetujuan OECD (Mahon & McBride, 2010:2). Meski demikian, OECD memiliki peran penting sebagai tempat bagi dikonstruksi penelitian transnasional dan ide kebijakan yang dapat mendorong isu-isu kontemporer dalam lingkup yang luas. Dalam hal ini OECD berperan sebagai '*purveyor of ideas*' yang memiliki posisi sentral dalam pemerintahan kontemporer global yang mana dalam sektor kebijakan, OECD kemudian memiliki peran untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara dan memetakan solusi '*best practice*' (Mahon & McBride, 2010:3).

Sementara, dilihat dari perspektif keanggotaan, OECD memiliki lingkup keanggotaan yang cukup kecil, yang hanya terbatas pada 30an negara saja, termasuk Amerika Serikat dan Jepang dan sejumlah negara kapitalis lainnya, yang secara otomatis membuat OECD sebagai '*rich nation's club*' (Mahon & McBride, 2010:5). Berdasarkan hal tersebut, OECD kemudian memiliki peran yang signifikan dalam mengkonstruksi tatanan dunia pasca-perang, yang bertujuan untuk membangun dasar unifikasi perekonomian Eropa Barat yang juga mengkonstitusikan blok Atlantik Utara.

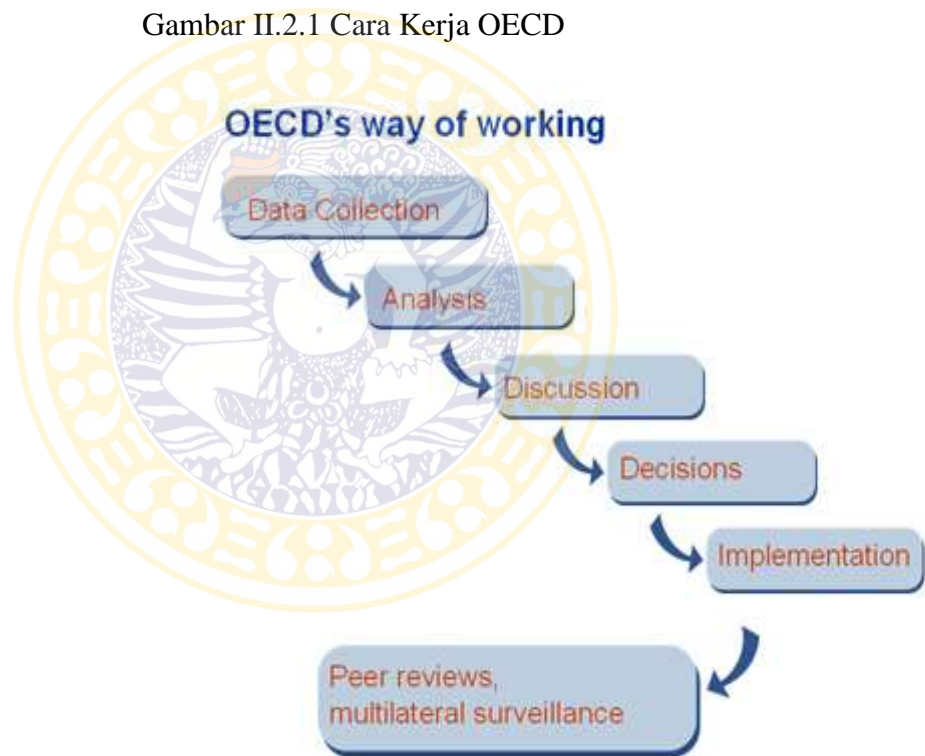
OECD turut berupaya untuk memperluas pengaruhnya dengan melakukan ekspansi keanggotaan terutama pada negara-negara yang dinilai memiliki kekuatan ekonomi di Asia dan Amerika Latin. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama OECD sebagai *globalization hub*, yang pada 2007 juga telah mempertimbangkan masuknya anggota baru dari sejumlah negara termasuk Israel. Sebagai organisasi internasional yang memiliki posisi strategis, dalam arti OECD berperan penting dalam perpolitikan internasional, OECD memiliki sejumlah fungsi yang kemudian dapat menjadi insentif bagi negara anggotanya.

Fungsi OECD di antaranya adalah (1) fungsi OECD sebagai media sentralisasi, yakni OECD sebagai organisasi internasional yang mampu menjadi fasilitator forum yang mampu mengumpulkan negara anggotanya secara kolektif; (2) fungsi OECD sebagai organisasi yang *independence*, yang artinya OECD memiliki otonom tersendiri dalam membentuk regulasi dan mengatur negara anggotanya; (3) fungsi OECD sebagai *enforcer*, dalam arti OECD mampu menjadi pendorong bagi negara anggotanya untuk mengaplikasikan kebijakan

sesuai dengan regulasi OECD (Abbott & Snidal, 1988:20); dan (4) fungsi OECD sebagai pembentuk identitas, di mana OECD membentuk standar perilaku bagi negara anggotanya yang kemudian mencerminkan identitas negara anggotanya sesuai dengan norma dan identitas OECD sebagai organisasi internasional (Porter & Webb, 2007:5).

II.2 Peran OECD sebagai Media Sentralisasi

Gambar II.2.1 Cara Kerja OECD



Sumber: OECD. (2016). OECD: What We Do and How. Organization for Economic Cooperation and Development.

OECD memiliki peran sebagai media sentralisasi yang dapat menjadi fasilitator bagi negara anggotanya untuk menyediakan forum yang dapat menjadi tempat bagi negara anggota, negara non anggota, hingga aktor non negara untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Peran OECD

sebagai media sentralisasi dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari cara kerja OECD (terlihat pada Gambar II.2.1) yang merefleksikan bagaimana OECD dapat melakukan tugasnya dengan baik. Cara kerja OECD ini dilakukan berdasarkan kegiatan memonitor negara anggotanya maupun negara non anggota sekaligus memproyeksikan perkembangan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam hal ini, badan yang memiliki tugas untuk melakukan sentralisasi adalah pihak Sekretariat OECD yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan hasil diskusi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota OECD dan sekaligus para ahli. Setelah itu, Dewan OECD menjadi pihak yang bertugas untuk membuat keputusan dan lebih lanjut lagi kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan oleh pemerintahan negara anggota (OECD, 2016).

Setelah melalui proses implementasi dalam kebijakannya, maka Dewan OECD melakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan peninjauan secara bersamaan dengan pemerintah negara tersebut melalui pengawasan multilateral dan proses *peer review*, di mana performa negara secara individual di monitor oleh rekan-rekan negaranya yang kemudian dibahas dalam level komite untuk menunjang efektivitas fungsi organisasi (OECD, 2016). Sebagai contoh dalam hal ini adalah saat melakukan peninjauan terhadap masalah kasus suap, di mana OECD melakukan sebuah konvensi dalam rangka memerangi kasus-kasus penyuapan yang terjadi di dalam dunia internasional khususnya dalam dunia bisnis secara internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya OECD melakukan dengan terorganisir, diskusi komite yang terjadi sering kali berubah menjadi proses negosiasi yang di mana negara-negara yang tergabung dalam OECD sepakat dengan pertauran yang ada dalam dunia kerjasama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat melakukan diskusi komite, apabila melihat peluang untuk melakukan kerjasama atau kesepakatan maka dapat dilakukan pertemuan secara langsung dan secara formal dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk melakukan proses negosiasi demi tercapainya tujuan bersama negara-negara tersebut. Dengan terciptanya kondisi ini maka OECD bisa menciptakan sebuah standar kebijakan tertentu dan menjadi model bagi negara-negara tersebut.

Setelah OECD menghasilkan hal tersebut, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh OECD adalah mempublikasikannya. Publikasi *output* yang dilakukan OECD merupakan bukti utama yang menunjukkan kredibilitas OECD sebagai organisasi internasional yang mampu memberikan kontribusi positif bagi negara anggotanya (OECD, 2016). Publikasi hasil kerja OECD di antaranya dicakup dalam OECD Economic Outlook, OECD Factbook, OECD Economic Surveys, dan Going for Growth. Cara kerja tersebut diperlihatkan melalui Gambar II.2.1.

Berdasarkan cara kerjanya tersebut, maka terlihat bahwa negara-negara anggota OECD dapat memanfaatkan fungsi OECD, dalam hal ini adalah fungsi sentralisasi, yang dapat menguntungkan negara anggota OECD untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan anggota-anggota OECD lainnya. Terlebih, anggota OECD juga mendapatkan keuntungan dari hasil publikasi yang diproduksi oleh OECD

sebagai suatu masukan yang kemudian dapat diterapkan negara anggota OECD dalam kebijakan-kebijakannya. Berdasarkan hal tersebut, OECD jelas memperlihatkan perannya secara signifikan sebagai organisasi *think tank*.

Gambar II.2.2 Struktur Organisasi OECD



Berdasarkan Gambar II.2.2 terkait Struktur Organisasi OECD, dalam organisasi internasional OECD ini dalam mengambil keputusan harus melewati beberapa tahap supaya kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia internasional. Pembagian bidang dalam pengambilan keputusan yang dilakukan OECD terdiri dari *Council* atau Dewan, yaitu sebagai pengambil keputusan yang paling tinggi dalam OECD, di mana Dewan OECD ini merupakan satu wakil dari setiap negara-negara anggota dan ditambah dengan satu perwakilan dari komisi Eropa (OECD, 2016). Pertemuan antara Dewan OECD ini

ditengahi oleh Sekretariat Jenderal yang membahas tentang masalah-masalah kunci yang menjadi prioritas OECD dalam memberikan solusi sehingga kredibilitas OECD sebagai organisasi internasional dapat terjaga.

Hasil pembahasan antara para Dewan ini kemudian ditindaklanjuti dan diterapkan oleh Sekretariat Jenderal OECD. Setelah itu, proses pengambilan keputusan dilanjutkan oleh para *Committees* atau komite yang merupakan perwakilan dari 34 negara-negara anggota OECD yang bertugas dalam memberikan ide dan gagasan serta memberikan peninjauan terhadap kebijakan luas yang meliputi ekonomi, jasa, sains, ketenagakerjaan, pendidikan dan ekonomi pasar. Para komite ini kurang lebih berjumlah 250 komite, yang terdiri dari para pekerja dan para ahli serta meliputi 40.000 pejabat senior dan administrasi nasional yang melakukan pertemuan rutin setiap tahunnya di OECD tersebut (OECD, 2016).

Setelah pertemuan tahunan tersebut selesai, para komite tersebut kembali ke negaranya masing-masing dan dapat mengakses dokumen yang berisi informasi penting serta bertukar informasi dengan sesama negara anggota melalui jaringan khusus. Lalu yang terakhir, dalam proses pengambilan keputusan OECD adalah *Secretariat*, adalah Angel Gurría yang menjabat sebagai kepala atau disebut juga dengan Sekretaris Jenderal dari organisasi tersebut yang dibantu oleh satu orang Wakil Jenderal, bertugas sebagai mediator atau penjemputan antara delegasi dari negara anggota maupun negara non anggota yang ingin melakukan dialog hubungan dengan OECD (OECD, 2016).

Saat ini, OECD yang bermarkas di Perancis ini memiliki kurang lebih 2500 staf yang memberikan dukungan terhadap para komitennya, dan menjalankan tugas dari Dewan OECD dengan tujuan menjaga kredibilitas OECD yang sudah diakui oleh dunia secara internasional. Para staf OECD terdiri dari berbagai macam kalangan diantaranya, kalangan ekonomi, kalangan ilmuwan, dan kalangan pengacara serta kalangan profesional lainnya.

Struktur organisasi OECD tersebut mencerminkan bagaimana OECD kemudian menjalankan fungsinya secara terpusat. Berdasarkan hal tersebut, maka OECD menjalankan fungsi sentralisasi yang berkontribusi bagi negara anggota OECD untuk semakin mudah mengakses berbagai hasil diskusi yang dilakukan dalam OECD. Selain itu, melalui struktur organisasi tersebut, negara anggota OECD juga dapat semakin mudah berperan secara aktif dalam organisasi dan ikut membangun nilai-nilai dalam organisasi.

II.3 Peran *Independence* OECD

Sebagai organisasi internasional, OECD berperan secara independen, dalam arti OECD memiliki level otonomi tersendiri dalam menjalankan fungsinya. Meski OECD dapat dimanfaatkan sebagai alat bagi pemerintah negara anggotanya sebagai media bagi terjalinnya kerjasama dalam sektor-sektor tertentu, OECD pada dasarnya tetap memiliki otonomi dalam menjalankan misinya. Oleh karenanya, OECD sebagai organisasi internasional yang independen memiliki misi tersendiri yang ditujukan untuk mencapai tujuan utama sebagai organisasi internasional.

Misi OECD yang utama adalah untuk mengumpulkan negara-negara anggotanya yang memiliki komitmen dalam demokrasi dan ekonomi pasar untuk (1) mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) meningkatkan standar hidup dan mendorong ditingkatkannya peluang kerja; (3) mengontrol stabilitas finansial; (4) membantu dan mendampingi perkembangan ekonomi di seluruh dunia; dan yang terakhir (5) berkontribusi pada ekspansi perdagangan dunia. Kelima misi yang dibentuk dan diformulasikan OECD ini merefleksikan bahwa OECD merupakan organisasi internasional yang independen dalam arti OECD memiliki kepentingan sendiri untuk menjalankan misinya dengan adanya dukungan dari negara anggotanya (Golstein-Galperin, 2012:2).

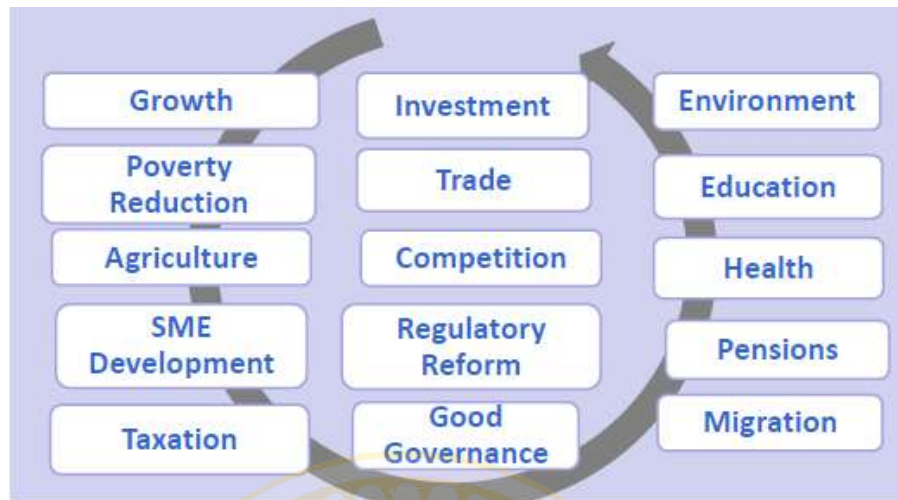
Dengan fungsinya sebagai lembaga yang independen, OECD dapat mendorong negara anggotanya untuk bertindak dalam rangka mencapai misi-misinya. Oleh karenanya, OECD dengan demikian dapat mempengaruhi agenda-agenda nasional negara anggotanya dan lebih lanjut dapat mempengaruhi kebijakan negara anggotanya. Dalam OECD sendiri peran independen diperlihatkan dari eksistensi para ahli sebagai komunitas epistemik yang bekerja secara netral dan mandiri dalam rangka mendampingi negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan umum terkait dengan isu perekonomian dan sosial serta kesejahteraan masyarakat (Golstein-Galperin, 2012:3). Cara kerja komunitas epistemik ini dengan demikian tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan negara anggota OECD.

II.4 Peran OECD sebagai *Enforcer*

OECD sebagai organisasi internasional tidak mempraktikkan peraturan yang mutlak bagi negara anggotanya, namun OECD bekerja dengan memberikan rekomendasi melalui metode terbuka untuk mendorong adanya koordinasi antar negara anggotanya untuk mencapai tujuannya. Dalam mempraktikkan metodenya ini, OECD telah mencapai kesuksesannya dengan mengaplikasikan regulasi transnasional yang *'soft'* (Marcussen, 2002:45). Pengukuran regulasi yang *'soft'* memungkinkan OECD untuk memberikan penanganan secara eksplisit terhadap isu-isu yang kontroversial dengan mempertahankan otoritas ideasionalnya kepada negara anggotanya.

Sejalan dengan prinsip subsidiaritas, OECD masih memberikan keleluasaan bagi negara anggotanya untuk bebas menentukan dan menjalankan keputusannya sesuai konsep nasionalnya di dalam kerangka norma OECD. Melalui penerapan prinsip ini, maka terlihat bahwa OECD menjalankan regulasi yang *'soft'* kepada negara namun tetap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara untuk bertindak (Marcussen, 2002:45).

Gambar II.4.1 Area Bidang Kerja dalam OECD



Sumber: Golstein-Galperin, Rita. (2012). Israel and the OECD. Foreign Trade Administration of Israel.

Dalam membantu negara-negara anggotanya, OECD bergerak dalam area bidang kerja tertentu yang ke semuanya berfokus pada kesejahteraan sosial negara. Berdasarkan Gambar II.4.1, terdapat sejumlah area kebijakan OECD, yakni pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, pengurangan kemiskinan, edukasi, kesehatan, dan lain-lain (Golstein-Galperin, 2012:4). Area kebijakan merujuk pada kemampuan OECD untuk menjadi penentu topik diskusi antar negara. Pada akhirnya, melalui diskusi dalam area kebijakan tersebut, OECD dapat memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang baik untuk diaplikasikan negara untuk memperbaiki kesejahteraan negaranya.

Konseptualisasi peran OECD sebagai organisasi internasional digambarkan melalui *'idea game'* di mana organisasi internasional memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, memanipulasi data, pengetahuan, visi dan ide dan mendifusikan kesemuanya kepada negara anggotanya serta terlebih ke

sejumlah negara non-anggota. Dalam *'idea game'* yang diterapkan dalam OECD, OECD memainkan peran sebagai *ideational artist* dan *idetional arbitrator* yang di gambarkan melalui fungsinya untuk menginformasikan berbagai isu tentang perdebatan politik dan ekonomi nasional dan juga memperkenalkan tema politik dan ekonomi yang baru dalam agenda nasional (Marcussen, 2002:46).

Sebagai organisasi internasional, OECD memiliki badan yang berisikan penasehat dan para ahli yang membentuk komunitas epistemik yang bekerja memberikan diskursus mengenai kebijakan terkait permasalahan isu-isu yang terjadi di dunia. Singkatnya, OECD sebagai organisasi internasional bekerja secara independen dan netral dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara-negara anggotanya.

Di sisi lain, OECD juga berperan sebagai *ideational arbitrator* dengan menyediakan perantara dengan bentuk diskusi para ahli secara berimbang (Marcussen, 2002:47). Dalam hal ini, OECD dapat membentuk kondisi yang kondusif bagi negara-negara anggota untuk berdeliberasi, bersosialisasi, dan melakukan internalisasi norma. Kedua peran tersebut secara konkrit dimanifestasikan melalui upayanya dalam membangun ide-ide terkait kebijakan yang berhubungan dengan isu sosial dan ekonomi, khususnya dalam area perkembangan ekonomi. Salah satu hasil kerja OECD diperlihatkan pada tahun 1970an yang mana OECD memperkenalkan paradigma stabilitas *anti inflationary* ke dalam agenda nasional. Peran-peran ini juga menjelaskan mengenai konteks proses bagaimana pengambilan keputusan dalam organisasi internasional diambil.

Sebagai *ideational artist* dan *ideational arbitrator*, OECD bekerja melalui pengawasan multilateral yakni dengan mempublikasikan survei negara anggotanya secara reguler yang dilakukan setiap tahunnya dengan menganalisis situasi makro ekonomi dan performa ekonomi negara-negara anggotanya (Marcussen, 2002:46). Setiap tahunnya, penasehat dan para ahli berkumpul dalam komite dan kelompok kerja untuk mendiskusikan permasalahan terkait dengan *common interest* negara anggota berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan analisis serta telah dielaborasi oleh sekretariat OECD dan negara anggota. Proses ini dideskripsikan sebagai konferensi *permanent intergovernmental* yang setiap tahunnya tumbuh semakin kompleks dengan hadirnya berbagai pihak dan komite yang ditambahkan ke dalam bagian dari anggota awal OECD.

Berdasarkan peran-perannya ini, OECD dengan demikian menyediakan insentif-insentif bagi negara anggotanya baik insentif yang berdampak positif maupun negatif yang kemudian mempengaruhi agenda nasional negara anggota yang bersangkutan. Meski demikian, OECD hanya memainkan peran sebagai *enforcer* yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara anggotanya melalui regulasi yang *soft* yang secara otomatis memungkinkan negara anggotanya untuk bertindak secara otonom dalam memanfaatkan fungsi yang dimiliki oleh OECD ini. Peran-peran OECD ini dinilai sukses ketika OECD mampu memproduksi hasil berupa kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh negara anggota dan menguntungkan negara anggotanya.

II.5 Peran OECD sebagai Pembentuk Identitas

OECD sebagai organisasi internasional dikenal memiliki identitas sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian teknis yang memiliki peran dalam dunia perekonomian, sosial, dan politik. Berdasarkan identitasnya tersebut, OECD memberikan kontribusi positif terhadap pemerintahan global dengan memberikan jaringan pengetahuan yang direfleksikan melalui nilai-nilai yang dianut OECD.

Pengetahuan yang dibentuk oleh OECD merupakan jaringan data yang diproduksi oleh OECD melalui berbagai publikasi mengenai perkembangan ekonomi dan praktik kebijakan yang kemudian mengkonstruksikan identitas OECD yang dibangun secara tidak langsung melalui aktivitas negara-negara anggotanya. Melalui pengetahuan yang diproduksi tersebut, OECD sekaligus merepresentasikan identitas negara-negara anggotanya (Porter & Webb, 2007:12). Dalam hal ini, identitas OECD yang turut merepresentasikan negara-negara anggotanya diperlihatkan melalui diaplikasikannya kebijakan-kebijakan yang berasal dari rekomendasi hasil diskusi dalam OECD.

Di pandang melalui perspektif konstruktivis, OECD sebagai organisasi internasional turut berfungsi sebagai *identity-defining*, yang mampu membentuk identitas negara anggotanya (Porter & Webb, 2007:10). Dalam membentuk identitas negara anggotanya, OECD menggunakan pengembangan norma dalam pengaplikasian kebijakan sosial maupun kebijakan ekonomi negara-negara anggota OECD. Hal ini direalisasikan dengan dibentuknya standar terhadap *appropriate behavior* yang kemudian diharapkan mampu dipraktikkan oleh

negara anggota OECD, yang secara umum bertujuan untuk menjadikan negara anggotanya untuk memiliki identitas sebagai negara modern, liberal, *market friendly*, dan efisien. Oleh karenanya, OECD kemudian mampu membentuk identitas negara anggotanya yang secara otomatis membedakan identitas negara anggota dan negara non anggota.

Bentuk perbedaan identitas ini pada praktiknya diperlihatkan OECD dengan menyebut negara anggotanya lebih *superior*, dalam arti negara anggota OECD memiliki posisi *superior* dalam membentuk peradaban ekonomi dan sosial di dunia jika dibandingkan dengan negara non anggota OECD. Hal ini diungkapkan oleh Thorkil Kristensen, yakni Sekretaris Jenderal OECD yang pertama, bahwa

... the industrial countries with market economies have a definite mission in the world during the present phase of history. They have been the forerunners in economic development; and they will remain for a long time the pioneers in a number of fields because their structures are more refined and their national economies more interwoven... They can, therefore, develop certain techniques of economic policy making that can later be transferred to other parts of the world... that are less highly developed (Porter & Webb, 2007:12).

Identitas negara anggota OECD dibentuk berdasarkan adanya proses konstruksi identitas yang dilakukan melalui negosiasi antar negara yang merujuk pada kelayakan perilaku yang menjadi standar OECD sebagai organisasi internasional yang kemudian mampu menjadikan OECD berpengaruh dalam perpolitikan internasional. Hal ini direfleksikan melalui '*logic of appropriateness*'

yang melihat adanya proses pilihan kebijakan sebagai salah satu penentu apa yang kemudian layak menjadi standar perilaku bagi negara anggota yang identitasnya dibentuk melalui OECD. *Logic of appropriateness* ini dibentuk berdasarkan diskusi atas apa yang kemudian dinilai sebagai ‘benar’, yang secara otomatis tidak selalu dapat memenuhi kepentingan nasional negara anggota (Porter & Webb, 2007:13).

Dalam hal ini, OECD memiliki peran signifikan dalam membentuk norma dan regulasi yang berbeda dan unik. Hal ini dilakukan OECD dengan menyediakan “a setting for reflection and discussion, based on policy research and analysis, that helps governments shape policy” (Porter & Webb, 2007:12). Identifikasi OECD terkait kebijakan yang baik atau ‘*best practice*’ lebih lanjut menjadi bagian identitas dari *modern state*. Meski demikian, OECD juga tetap memberikan keleluasaan bagi negara anggotanya untuk menggunakan kedaulatannya sebagai bentuk otonomi negara untuk memutuskan kebijakan yang pantas diaplikasikan negara. Peran OECD yang mampu membentuk identitas ini terlihat dalam mekanisme OECD dalam proses *peer review*² yang sangat vital bagi dewan komite.

OECD dalam hal ini memiliki otonomi tersendiri dalam mengembangkan ide-idenya yang direfleksikan dari diskursus internal OECD yang cenderung didominasi oleh para ekonomis profesional Anglo-American. Berdasarkan hal tersebut, OECD tidak hanya beroperasi dalam satu dimensi saja. Artinya, OECD

² *Peer review* yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan secara bersamaan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan multilateral, dan *peer pressure* untuk menyelaraskan atau mereformasi efektivitas OECD.

tidak hanya berfokus dalam sektor ekonomi saja, namun juga dalam sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat (Mahon & McBride, 2010:23).

Dalam hal ini, OECD fokus untuk mengembangkan identitas dalam tiga area yang luas, yakni: (1) inklusivitas dan pertumbuhan, di mana OECD memfokuskan analisis dalam mendukung negara-negara untuk mendesain dan mengimplementasikan agenda-agenda terkait dengan reformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan; (2) interkoneksi untuk pertumbuhan, yang mana inisiatif ini ditujukan untuk menganalisis munculnya interkoneksi antar negara dan kompleksitasnya yang menjadi karakter dasar bagi ekonomi global; dan yang terakhir (3) institusi dan pemerintahan untuk pertumbuhan, yang mana OECD berargumen bahwa krisis finansial dan krisis ekonomi yang terjadi telah mempengaruhi pasar, pemerintah, dan bisnis-bisnis secara negative (Jackson, 2013:2).

Berdasarkan fungsinya ini, maka negara yang tergabung dalam OECD secara tidak langsung dapat membentuk identitasnya sebagai anggota OECD. Dalam hal ini, bergabung dengan OECD secara otomatis akan memunculkan reputasi negara anggota OECD sebagai negara demokratis yang memiliki perekonomian yang maju. Sehingga, dapat dikatakan bahwa bergabungnya negara dalam OECD sekaligus dapat berdampak pada terkonstruksinya identitas negara sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh OECD.

II.6 Posisi Strategis OECD bagi Israel

Berdasarkan ketiga fungsi OECD yang telah dipaparkan, terlihat bahwa OECD memiliki posisi strategis bagi negara anggotanya sehingga negara anggota OECD dapat memanfaatkan keanggotaannya dalam OECD melalui fungsi yang ditawarkan oleh OECD. Hal ini juga berlaku bagi Israel, yang melihat adanya kesempatan terkait insentif yang dapat diperoleh Israel ketika menjadi anggota OECD. Insentif-insentif tersebut dapat diperoleh Israel seiring dengan fungsi yang ditawarkan oleh OECD sebagai organisasi internasional. Pada dasarnya, insentif-insentif yang menjadi latar belakang Israel kemudian memutuskan untuk bergabung dengan OECD disesuaikan dengan kepentingan nasional Israel, yakni untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam lingkup nasionalnya.

Pertama, adalah permasalahan Israel terkait reputasinya yang buruk di ranah internasional. Reputasi buruk Israel ini terkait dengan konflik-konflik yang sering dialami Israel dengan negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah invasi Israel yang dilakukan terhadap Palestina dengan mengokupasi West Bank, dan memblokade Jalur Gaza. Aksi Israel ini secara otomatis membentuk stigma Israel sebagai pelanggar HAM karena dinilai telah melanggar hak asasi warga Palestina. Berdasarkan tindakannya tersebut, Israel lantas juga mendapat reputasi buruk sebagai negara yang dinilai tidak demokratis.

Dengan bergabungnya Israel dengan OECD, secara tidak langsung Israel dapat memperoleh dukungan dari OECD beserta anggota-anggotanya yang lain. Selain itu, OECD sebagai pembentuk identitas dapat sekaligus membentuk

identitas Israel sebagai negara demokratis yang berperan terhadap misi peradaban dunia dengan ikut serta dalam mengaplikasikan kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan norma dan identitas OECD sebagai organisasi internasional.

Kedua, adalah permasalahan Israel terkait dengan permasalahan dalam sektor ekonomi. Israel memiliki sejumlah permasalahan ekonomi berupa tingginya angka korupsi, minimnya rata-rata pendidikan, dan permasalahan kesenjangan sosial. Dengan bergabung dalam OECD, Israel dapat memperoleh berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat berdampak positif terhadap perekonomian Israel. Dalam hal ini, fungsi OECD yang dimanfaatkan oleh Israel adalah fungsi sentralisasi dan fungsi *enforcer*. Sebagai media sentralisasi, Israel dapat menjadikan OECD sebagai organisasi internasional yang mampu mendorong Israel untuk berinteraksi dengan negara anggota OECD yang lain tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga interaksi yang tercipta pun akan menjadi efektif. Selain itu, sebagai *enforcer*, OECD juga dapat mendorong Israel untuk mengaplikasikan kebijakan sosial maupun kebijakan ekonomi yang sejalan dengan tujuan OECD sehingga pada akhirnya Israel dapat diuntungkan melalui keanggotannya dalam OECD.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada akhirnya lebih lanjut melalui OECD, Israel dapat membuka peluang untuk berinteraksi dengan negara-negara maju secara efektif dan efisien melalui adanya sentralisasi dalam OECD. Sementara itu, dalam sektor perekonomian, Israel juga dapat memperbaiki performa perekonomiannya, khususnya dalam membangun reputasi Israel sebagai negara

yang dapat dipercaya bagi para rekan-rekan negara tetangga, sehingga pada akhirnya Israel dapat meningkatkan daya persaingannya dalam ranah global.



BAB III

INSENTIF BERGABUNGNYA ISRAEL KE DALAM OECD

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai analisis insentif yang didapat oleh Israel ketika bergabung dengan OECD. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi internasional yang memperlihatkan bahwa negara dapat memanfaatkan organisasi internasional untuk mendapatkan insentif, terutama insentif berupa berkurangnya *transaction cost* dalam berinteraksi dengan negara lain, yang ditujukan untuk mencapai tujuannya untuk mendapat keuntungan berupa keuntungan ekonomi. Analisis insentif yang diperoleh Israel yakni berupa insentif ekonomi dan insentif politik.

III.1 Upaya Israel untuk bergabung dalam OECD

Sejak tahun 1990, Israel telah berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan OECD. Israel tertarik dengan organisasi internasional ini karena bergerak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2016). Pada tahun 1994, Israel memutuskan untuk memantau berbagai kegiatan dan perilaku serta kinerja yang ditunjukkan OECD kepada dunia. Dalam hal ini, yang menjadi fokus Israel adalah kerja nyata OECD dalam membantu memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Selama proses pemantauan tersebut, Israel merasa dapat mengembangkan negaranya apabila bisa bergabung dengan organisasi internasional tersebut. Pasalnya, OECD sebagai organisasi internasional diikuti oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara benua Eropa lainnya seperti Perancis, Inggris, Italia. Pada saat

tahun 1997, Israel mulai menunjukkan keseriusannya untuk ingin bergabung dengan OECD (OECD. 2016). Untuk merealisasikan hal tersebut, Israel membentuk panitia persiapan untuk mempersiapkan syarat dan ketentuan supaya dapat bergabung dengan OECD.

Namun, usaha Israel tersebut baru mendapatkan respon positif dari OECD pada tahun 2007, ketika OECD mengundang Israel untuk berdiskusi secara terbuka terkait minat Israel untuk bergabung dengan OECD. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Gubernur bank Israel Stanley Fisher dan Menteri Keuangan Israel Yuval Stenitsz melakukan dialog dengan Sekretariat Jenderal OECD yaitu Angel Gurría, sehubungan dengan minat Israel untuk bergabung dengan OECD (OECD. 2016). Tepatnya, 16 Mei 2007, Israel berdiskusi dengan pihak OECD bersama-sama dengan negara-negara lainnya yang ingin bergabung juga dengan OECD seperti Estonia, Chile, Rusia, dan Slovenia. Pada saat itu, Israel berbiacara tentang *roadmap* yang berisi tentang data mengenai ekonomi dan keadaan masyarakat yang tinggal di Israel.

Pada 30 November 2007, OECD menerima proposal pengajuan Israel terkait keinginan Israel untuk menjadi anggota tetap OECD untuk didiskusikan oleh pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Dalam penyerahan *roadmap* tersebut, juga dicantumkan penjelasan syarat dan ketentuan serta kondisi untuk bergabung dalam organisasi internasional OECD. Israel pada saat itu diwakili oleh konselor ekonomi Kedutaan Besar Israel yang berada di Perancis yaitu Oren Bar-El sementara dari pihak OECD sendiri diwakili oleh Sekretariat Jenderal OECD yaitu Angel Gurría (OECD. 2016).

Selama kurang lebih dua sampai tiga tahun, OECD dan negara-negara anggotanya secara bersama-sama melakukan *review* atau peninjauan secara luas tentang kebijakan terkait perekonomian dan sektor sosial yang di terapkan di Israel. Peninjauan ini mencakup observasi terkait posisi negara dalam instrumen legal OECD serta kebijakan Israel yang dianggap koheren atau tidak, dianggap cocok atau tidak, dengan negara-negara anggota OECD. Pada 19 Januari 2010, Israel menandatangani perjanjian *Privileges and Immunities of The Organization*, tujuan dari perjanjian ini adalah supaya organisasi dapat berperan terhadap dunia secara efektif dan bertanggung jawab. Israel diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Avigdor Lieberman dan Sekretariat Jenderal OECD Angel Gurría (OECD. 2016).

OECD pada 10 Mei 2010, menyatakan bahwa Israel dianggap menghormati sistem yang dijalani oleh OECD, menghormati jajaran dewan kehormatan dan standar yang diterapkan OECD. Pernyataan yang diungkapkan oleh Duta Besar Italia untuk OECD, Antonio Armellini, Angel Gurría selaku Sekretariat Jenderal OECD dan Nicola Bonnucci dari Departemen Legal OECD. Setelah satu bulan, diumumkan oleh OECD bahwa Israel menjadi anggota tetap dan secara resmi diterima oleh OECD. Israel diwakili oleh Orit Noked selaku Kementerian Industri Israel untuk organisasi internasional multilateral, dan Nimrod Barkan selaku delegasi Israel untuk kedutaan besar Israel di Perancis dan tentu saja Angel Gurría selaku Sekretariat Jenderal OECD.

Puncaknya terjadi pada 7 September 2010, saat Israel menandatangani OECD *Covention*, yang menandakan bahwa Israel siap untuk berkomitmen dan

berusaha mencapai tujuannya secara penuh terhadap organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pada saat momen tersebut, Israel diwakili oleh Raphael Norav selaku konselor Kedutaan Besar Israel di Perancis, lalu Frederic Depetris selaku Kementerian Luar Negeri Perancis, dan Jose Fectau dari OECD yang tergabung dalam departemen yang berurusan dengan hukum (OECD, 2016).

III.2 Keuntungan *Transaction Cost* dalam OECD

Bergabungnya Israel ke dalam OECD pada tahun 2010 diikuti dengan kesediaan OECD untuk menyediakan Israel forum-forum bagi Israel untuk berdiskusi dengan negara-negara anggota OECD lainnya untuk memperbaiki performa kebijakannya melalui *branding leverage*, yakni melalui komparasi pengalaman-pengalaman kebijakan secara langsung (*peer reviews*), identifikasi dan pertukaran *best practice*, pencarian solusi terbaik untuk tantangan-tantangan umum (bersama), dan koordinasi kebijakan nasional dan internasional.

Melalui OECD, Israel dapat berpartisipasi dalam diskusi kebijakan dan *standard setting* dalam OECD sendiri. Selain itu, Israel juga mendapatkan keuntungan dari program peninjauan dalam area kebijakan-kebijakan tertentu, di mana OECD juga berperan dalam memonitor progress peninjauan dan mengidentifikasi perbaikan yang memungkinkan. Secara khusus, Israel juga dapat memperoleh keuntungan melalui program pengawasan reguler OECD terhadap kebijakan struktural dan makroekonomi melalui Economic Surveys (Golstein-Galperin, 2012:5).

Keuntungan lainnya yang diperoleh Israel adalah adanya integrasi database dan publikasi yang diproduksi oleh OECD (Golstein-Galperin, 2012:6). Melalui hal tersebut, maka pembuat kebijakan Israel, peneliti, maupun para pebisnis untuk menjadi tolok ukur performa Israel dibandingkan negara-negara anggota OECD lainnya. Israel dengan demikian juga dilibatkan dalam berbagai macam material analitis OECD dalam Economic Outlook dan dan Going for Growth. Di sisi lain, Israel juga dapat memperoleh akses para ahli OECD sekaligus dengan akses terhadap penelitian dan analisis-analisis dalam lingkup yang luas.

Lebih khusus lagi, bergabungnya Israel dalam OECD juga memungkinkan Israel untuk memperbaiki *credit rating*-nya dalam pasar global, di mana keanggotaan OECD memberikan jaminan bagi negara anggotanya untuk memiliki standar yang cukup bagi aktivitas investasi asing. Sebagai konsekuensinya, Israel dapat meningkatkan investasi asing dan mengakses pasar OECD, salah satunya direalisasikan dengan ratifikasi Israel terhadap OECD Codes of Liberalisation, yang mengikat Israel untuk bersikap profesional dalam regulasi finansial (Golstein-Galperin, 2012:7). Oleh karenanya dalam sektor industri, Israel dapat menarik masuknya FDI, menghapus hambatan impor dan ekspor, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mempengaruhi pembuatan keputusan dalam OECD.

Keuntungan-keuntungan tersebut menggambarkan adanya keuntungan teknis yang dapat diperoleh Israel selama bergabung dengan OECD. Berangkat dari keuntungan teknis tersebut, lantas Israel juga dapat mendapatkan keuntungan yang selanjutnya berdampak pada sektor perekonomian dan sosial serta

kesejahteraan masyarakat Israel. Dalam hal ini, keuntungan teknis yang diperoleh Israel merujuk pada kemudahan akses yang didapatkan Israel baik dalam berinteraksi dengan negara-negara anggota OECD lainnya maupun kemudahan akses yang didapatkan untuk menjangkau hasil publikasi yang diproduksi oleh OECD. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa OECD secara signifikan mampu mengurangi *transaction cost* yang seharusnya dikeluarkan oleh Israel jika tidak bergabung dalam OECD.

Transaction cost yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya berupa biaya sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan negara anggota OECD lainnya dan juga biaya bagi Israel untuk mendapatkan informasi terkait dengan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh OECD yang dapat berkontribusi bagi perbaikan kebijakan ekonomi maupun sosial yang dapat diterapkan Israel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

III.3 Membaiknya Kondisi Sosial-Ekonomi Israel setelah Bergabung dalam OECD tahun 2010-2013

Setelah bergabung dengan OECD, tepatnya pada tahun 2010, Israel mengalami perbaikan yang cukup signifikan dalam sektor sosial dan ekonomi. Hal ini diperlihatkan dengan data-data terkait dengan kemajuan Israel dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sebelum bergabung dengan OECD, meski Israel sebelumnya diperhitungkan telah memiliki perekonomian yang stabil dan cukup mapan, namun Israel dihadapkan dengan sejumlah permasalahan terkait dengan tingginya angka kemiskinan dan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat

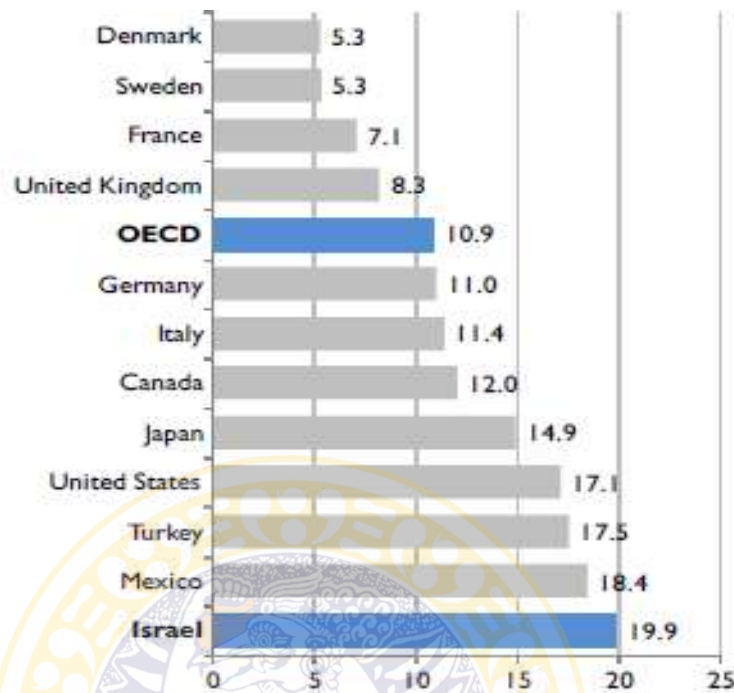
Israel yang mana kondisi ini terlihat semakin membaik setelah Israel bergabung dengan OECD hingga tahun 2013.

III.3.1 Kondisi Sosial-Ekonomi Israel sebelum Bergabung dalam OECD

Sejak tahun 1980, perkembangan ekonomi dunia mengalami reformasi yang cukup signifikan akibat dari perubahan pasar. Berdasarkan kondisi ini, Israel yang pada awal berdirinya mengedepankan manajemen ekonomi dengan pendekatan korporatis yang mengacu pada tersebarnya kepemilikan publik, *trade unions* yang kuat, dan restriksi perdagangan yang cukup ketat (OECD Observer, 2010). Sementara, pemerintah memiliki pengaruh yang kuat dalam pasar nasional, dan memegang penuh sektor telekomunikasi dan sektor energi. Pada tahun 1985, Israel mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik akibat diterapkannya kebijakan makroekonomi yang mengedepankan program stabilisasi yang didisain untuk menghentikan *hyperinflation* yang kemudian sukses dan ditindaklanjuti dengan pengimplementasian pendekatan *inflation-targeting* terhadap kebijakan moneter 1990an (OECD Observer, 2010).

Pada tahun 1990an, Israel juga mendapat banyak keuntungan ekonomi dari perkembangan teknologi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Israel. Hal ini didukung oleh adanya kebijakan inovasi yang kemudian semakin membuat Israel kompetitif dalam perekonomian global. Dalam perekonomian dunia, selain maju dalam sektor teknologi, Israel juga memiliki peran penting dalam industri berlian dunia, walaupun sektor ini hanya menyumbangkan keuntungan kecil bagi GDP negara.

Di pandang dari sisi historis dan geopolitik, Israel pada dasarnya diberi predikat sebagai *'island economy'* di kawasan Timur Tengah (OECD Observer, 2010). Pasalnya, Israel memiliki hubungan ekonomi yang lebih dengan negara-negara di luar kawasan Timur Tengah daripada dengan negara-negara tetangganya. Ini diperlihatkan dengan ikatan ekonomi Israel dengan Amerika Serikat dan Eropa yang bergerak dalam bidang perdagangan dan investasi. Hal ini kemudian berkontribusi pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi Israel sehingga Israel dipertimbangkan sebagai negara maju. Meski demikian, sebagai negara maju, Israel juga mengalami tingginya angka kemiskinan, khususnya di antara warga Israel-Arab dan Yahudi Ultra Ortodox. Berdasarkan permasalahan tersebut, Israel harus membuat keadaan lingkungan yang bagus dan kuat dalam negara serta merencanakan rencana jangka panjang terkait dengan perekonomian negaranya yang menjadi sebuah inti untuk kebijakan negaranya dalam hal makroekonomi dan mikroekonomi (OECD Observer, 2016).

III.3.1.1 Grafik *Income Poverty Rates* Israel dan OECD

Sumber: OECD (2010) *Israel: A Divided Society. Results of A Review of Labour- Market and Social Policy*

Berdasarkan grafik III.3.1.1 di atas, terlihat bahwa Israel pada dasarnya memiliki permasalahan kemiskinan yang cukup serius jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Berdasarkan data dari Laporan OECD, pada kurun waktu 2008-2010, diketahui bahwa hampir satu dari lima penduduk Israel tinggal dalam kemiskinan, yang mana pendapatan mereka kurang dari setengah median nasional, dan jumlah ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Israel yang hampir menyamai dua kali lipat rata-rata angka kemiskinan di negara-negara OECD lainnya yang rata-rata hanya 11% (OECD, 2010).

Tingginya angka kemiskinan di Israel tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa banyak penduduk usia kerja di Israel tidak memiliki pekerjaan. Data menunjukkan bahwa 40% dari penduduk Israel yang berusia 15 hingga 64 tidak

bekerja. Presentase ini lebih tinggi daripada rata-rata pengangguran di negara-negara OECD lainnya yang hanya berkisar pada 33%. Secara khusus, pengangguran terjadi secara tidak merata terutama pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yakni sebanyak 60% laki-laki Arab memiliki pekerjaan, sementara hanya 20% perempuan Arab yang memiliki pekerjaan. Berkebalikan dengan fakta tersebut, dalam kelompok Haredim, hampir 50% perempuan Haredim memiliki pekerjaan, sementara satu dari empat laki-laki Haredim memiliki pekerjaan, sementara sisanya lebih memilih untuk melanjutkan studi religious (OECD Observer, 2016).

Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa Israel memiliki permasalahan terkait dengan adanya kesenjangan sosial yang terjadi pada dua kelompok minoritas terbesar di Israel, yakni Arab-Israeli dan Haredim (Yahudi Ultra-Ortodox) yang secara umum kesulitan dalam memiliki pekerjaan dan cenderung berada pada tingkat kemiskinan dibandingkan dengan populasi Yahudi pada umumnya. Ini berkaitan dengan adanya segmentasi dalam *labour market* di Israel, di mana kelompok pekerja Arab dan Haredi memiliki pekerjaan dengan gaji rendah, yakni sebanyak 60-70% kelompok Arab dan Haredi memiliki gaji yang relatif rendah.

Kondisi Israel yang beragam tersebut menimbulkan masalah-masalah yang beragam juga di antaranya masalah ketenagakerjaan yang melibatkan tingkat tenaga kerja dan gaji yang berbeda-beda. Dalam kaum Yahudi sendiri yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah gaji dari pasangan yang sama-sama bekerja sehingga menjadi kunci dari meningkatnya rata-rata kemiskinan negara

sebesar 10 persen dari rata-rata negara OECD. Alasan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa keluarga yang berasal dari Arab dan Haredi rata-rata tidak memiliki pekerjaan atau salah satunya mendapatkan gaji dalam jumlah rendah, yakni sebanyak 50 % kelompok Arab dan sebanyak 60 % kelompok Haredi (OECD Observer, 2016).

Terdapat sejumlah faktor yang kemudian menyebabkan adanya kesenjangan dalam kelompok masyarakat Israel, khususnya yang terjadi dalam kelompok Arab dan kelompok Haredi. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan isu struktural yang mencakup adanya perbedaan dalam sistem edukasi, perbedaan investasi infrastruktur, pengaruh kultural, dan perbedaan akses dalam *social support* dan ketidakpercayaan antar komunitas sebagai konsekuensi dari konflik Arab-Israeli.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka jelas bahwa sebelum bergabung dalam OECD, Israel telah memiliki banyak permasalahan dalam sektor ekonomi dan sosial. Kondisi-kondisi tersebut lah yang kemudian menjadi latar belakang tindakan Israel untuk bergabung dalam OECD. Melalui OECD, diharapkan Israel mampu memperbaiki kondisi sosial dan perekonomiannya. Dalam hal ini, Israel memanfaatkan fungsi OECD sebagai organisasi internasional *think tank* yang bergerak dalam bidang pengembangan rekomendasi kebijakan-kebijakan terkait dengan permasalahan perekonomian maupun sosial.

III.3.2 Kondisi Ekonomi-Sosial Israel setelah Bergabung dalam OECD

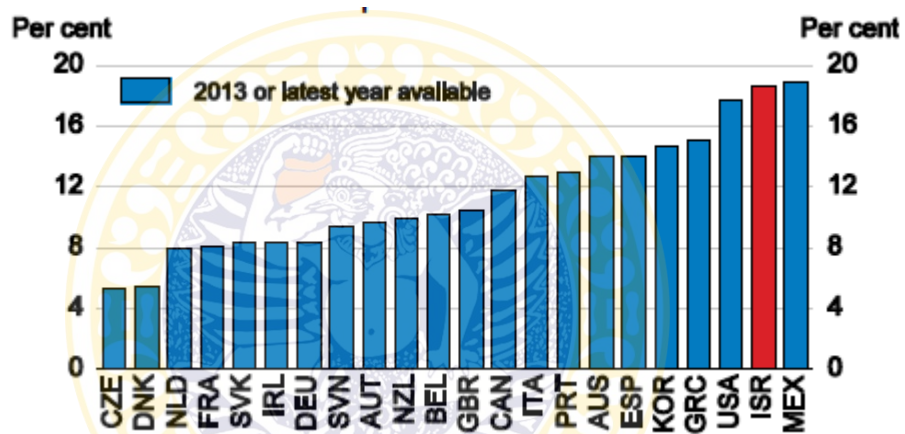
Sebagai negara yang memiliki ekonomi kecil dan terbuka, Israel dipengaruhi oleh perdagangan global yang di mana negara-negara Uni Eropa yang menjadi partner utama dalam hal perdagangan. Krisis yang terjadi ini belum mempengaruhi Israel sejauh ini, tetapi Israel melakukan tindakan preventif supaya terhindar dari krisis. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menurunkan target pertumbuhan GDP sekitar 3 persen di 2013. Menurut OECD (2013), setelah Israel bergabung dengan OECD, pada tahun 2013, Israel telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat dan rendahnya tingkat pengangguran, sementara tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat masih dalam tahap perbaikan. Berdasarkan laporan yang diterima OECD mengenai progress perekonomian Israel, Israel telah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata negara anggota OECD lainnya.

Setelah bergabung dalam OECD selama kurang lebih dua tahun, Israel mengalami progres yang cukup baik dalam sektor perekonomian. Progres yang utama adalah adanya integrasi populasi Israel dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam *labour market* seperti kelompok Arab-Israeli (terutama perempuan) dan kelompok ultra-ortodox Haredim (terutama laki-laki) yang sebelumnya menjadi tantangan utama dalam kesetaraan *labour market* di Israel, yang juga menjadi isu utama ketika Israel ingin bergabung dalam OECD (OECD Observer, 2013).

Pada tahun 2013, Israel telah mengalami progress setelah mengimplementasikan berbagai inisiatif sejak tahun 2010, yang mana inisiatif

tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan *employment rates* sebesar 2,4% untuk wanita Arab dan 6% untuk laki-laki Haredi (OECD Observer, 2013). Inisiatif-inisiatif tersebut direalisasikan melalui dibangunnya pusat pemerintahan yang mengatur ketenagakerjaan kelompok-kelompok. Dalam hal ini, OECD memiliki peran penting karena kebijakan yang diterapkan oleh Israel ditetapkan bersamaan dengan kolaborasi yang dilakukan pemerintah Israel dengan OECD

III.3.2.1 Grafik *Income Poverty Rate* tahun 2013



Sumber: OECD. 2016. OECD Economic Survey of Israel 2016. Organization for Economic Cooperation and Development.

Selain permasalahan ketenagakerjaan, Israel sebelumnya dikenal memiliki permasalahan tingginya angka kemiskinan, terutama jika dipandang melalui standar OECD. Untuk mengatasi hal ini, setelah bergabung dengan OECD, Israel fokus dalam mengimplementasikan strategi berupa peningkatan edukasi, memberikan akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih tinggi kepada kelompok-kelompok yang tidak beruntung, dan memperbaiki infrastruktur di wilayah terpencil di negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam *labour market* (OECD, 2016).

Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah Israel dalam hal ini adalah kebijakan Earned Income Tax Credit (EITC) yang diterapkan secara nasional untuk meningkatkan tingkat kredit populasi yang ditargetkan yang mulai beroperasi tahun 2011. Ekspansi kebijakan secara nasional ini telah meningkatkan angka penerima kredit dari 100.000 pada 2010 ke angka 420.000 pada 2011. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, Israel telah berhasil menurunkan angka *income poverty rates* dari 19.9% ke angka 18% di tahun 2013 (seperti terlihat pada grafik III.3.2.1).

Kebijakan yang lainnya adalah kebijakan terkait penguatan hak-hak terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kementerian Israel berupaya untuk memperkuat kapabilitas sistem penguatan hukum dengan menginisiasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan hukum ketenagakerjaan dengan melakukan kerjasama organisasi ketenagakerjaan dan Histadrut (organisasi uni ketenagakerjaan di Israel), dan dengan menambah 120 posisi dalam penguatan hukum dalam jangka waktu dua tahun. Secara umum, kolaborasi Israel dengan OECD telah membuktikan perbaikan yang signifikan dalam sektor sosio-ekonomi di Israel (OECD Observer, 2010).

Kemajuan-kemajuan yang dicapai Israel tidak dapat dilepaskan dari adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah Israel bersama dengan OECD, khususnya dengan anggota-anggota OECD. Selama kurun waktu 2010-2013, Israel secara aktif terlibat dalam aktivitas bersama dengan OECD sehingga Israel juga dapat memperoleh kontribusi positif berupa kemajuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat setelah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan

yang direkomendasikan oleh OECD. Hasilnya, setelah bergabung dengan OECD selama kurang lebih dua tahun, Israel dapat menyesejajarkan posisinya dengan negara OECD lainnya.



BAB IV

REPUTASI ISRAEL SETELAH BERGABUNG DALAM OECD

Dalam bagian ini, akan dipaparkan mengenai implikasi bergabungnya Israel dengan OECD terhadap reputasi Israel dalam ranah internasional. Penjelasan mengenai hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi organisasi internasional yang dicakup dalam OECD yang dapat dimanfaatkan oleh Israel sehingga melalui insentif yang didapat oleh Israel secara keseluruhan berdampak positif terhadap reputasi Israel di ranah internasional, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan diplomatiknya.

IV.1 Israel dalam Hubungan Internasional

Dalam ranah internasional, Israel dikenal sebagai negara yang cukup kontroversial. Hal ini dikarenakan oleh sengketa dengan Palestina selama bertahun-tahun yang turut berkontribusi pada tidak stabilnya kondisi perpolitikan di wilayah Timur Tengah. Berdasarkan reputasinya kontroversial tersebut, konsekuensinya Israel tidak mendapat dukungan dari negara-negara Arab-Islam dan juga negara-negara mayoritas Islam lainnya.

Kebijakan luar negeri Israel dipengaruhi oleh situasi strategis yang terjadi di Israel, yakni konflik Arab-Israel, dan penolakan terhadap Israel oleh negara-negara Arab. Tujuan utama dari kebijakan luar negeri Israel adalah untuk mengatasi isolasi diplomatik dan untuk mendapatkan pengakuan serta relasi yang baik dengan sebanyak-banyaknya negara, baik di Timur Tengah maupun di bagian dunia lainnya (Global Security, no date). Untuk mencapai tujuannya ini, Israel

berupaya untuk terlibat dalam berbagai aktivitas internasional seperti pembelian persenjataan, ekspor bantuan senjata, kerjasama intelejen bersama aliansinya, perdagangan komersil, dan lain-lain. Selain itu, untuk mengakhiri hubungan permusuhan dengan kekuatan negara-negara Arab-Islam yang telah diperangi Israel sejak tahun 1948, Israel telah menjadikan program kerjasama internasional, baik dalam organisasi internasional maupun rezim internasional, untuk mendapatkan penerimaan sebagai negara berdaulat secara luas.

Secara global, Israel telah membangun hubungan diplomatik dengan mayoritas negara-negara di dunia, terkecuali negara-negara Arab dan negara Muslim lainnya sejak 1967. Sebelumnya, pada tahun 1991, telah diadakan Konferensi Madrid yang ditujukan untuk menangani sengketa regional dengan mempertemukan Israel, Palestina dan negara-negara Arab lainnya dengan menghasilkan negosiasi bilateral maupun multilateral (Global Security, no date). Konferensi ini didesain untuk menyelesaikan isu-isu keamanan, perbatasan, dan isu lainnya dengan berbasis pada isu umum berupa status pengungsi, keamanan regional dan kontrol persenjataan, perhatian terhadap lingkungan, dan perkembangan ekonomi.

Hingga saat ini, Israel telah memiliki hubungan diplomatik dengan 163 negara yang mencakup 9 negara Muslim non-Arab dan 32 negara sub-Saharan yang juga bukan merupakan anggota dari Liga Arab. Sementara itu, dari 192 anggota PBB, 160 negara di antaranya telah mengakui eksistensi Israel sebagai negara (Global Security, no date). Selain itu yang menarik perhatian dunia, Israel juga bekerja sama dengan negara-negara dengan *power* dan kekuatan pasar yang

besar saat ini di dunia yaitu China, India dan Brazil yang bertujuan untuk mencapai progres ke depan dan mencapai hasil yang positif dalam sektor perekonomian maupun sosial.

Dengan terjalannya kerjasama antara negara-negara tersebut, Israel mendapatkan keuntungan dari kunjungan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam rangka kerjasama dalam hal ekonomi. Salah satu kerjasama Israel dengan negara-negara lainnya adalah seperti kerjasama yang dilakukan oleh Israel dengan India, yang mana India memiliki kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi dan memiliki para pekerja ahli sedangkan Israel berinvestasi dalam fasilitas untuk produksinya sehingga kolaborasi antara Israel dan India dapat bekerja secara optimal dan efektif.

Salah satu bidang yang menjadi andalan Israel adalah *dry land agriculture, agronomic research and water management technology*, yang mana keahlian Israel tersebut diakui oleh negara-negara sekelas Brazil dan India serta negara lainnya yang berorientasi membangun dunia. Selain itu, ikatan yang kuat antara kaum Yahudi di Israel antara satu sama lain membuat Israel mendapatkan akses dengan penduduk dunia yang berada di negara-negara BEM (Big Emerging Markets) yang dapat menjadi sumber dalam hal imigrasi.

Hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara kunci dalam pembangunan dunia sangatlah berkembang dan bermacam-macam, hal ini menunjukkan bahwa Israel sebagai negara yang dihormati dan dipandang di organisasi internasional ini yaitu OECD. OECD menghormati tawaran yang diajukan Israel dalam rangka pembangunan negaranya baik dari sektor ekonomi

maupun sektor politik, dengan prinsip nilai demokrasinya dan berusaha meningkatkan perekonomian negaranya menjadi *first world economy* (Global Security, no date).

Menjadi anggota tetap dari OECD ini merupakan bukti bagi Israel bahwa organisasi internasional layaknya OECD memiliki peran bagi negara untuk meningkatkan pengaruh politik Israel dalam dunia internasional yang direfleksikan dalam perannya dalam organisasi internasional sehingga Israel dapat memunculkan reputasi yang baru selain konfliknya dengan Palestina. Israel membuktikan bahwa negaranya juga dapat berkembang melebihi yang sekarang tanpa melalui konflik.

IV.2 Membaiknya Reputasi Israel di Dunia Internasional

Selain mendapatkan keuntungan berupa keuntungan dalam menjangkau hal-hal teknis yang mencerminkan adanya keuntungan *transaction cost* bagi Israel ketika bergabung dalam OECD dan juga keuntungan berupa kemajuan dalam sektor ekonomi dan sosial, Israel juga mendapatkan keuntungan berupa membaiknya reputasi Israel dalam ranah internasional. Dengan reputasi yang baik, maka Israel dapat memperoleh kepercayaan publik internasional terkait kemampuannya sebagai negara demokratis yang memiliki perekonomian maju.

Membaiknya reputasi internasional Israel dengan bergabung dalam OECD tidak dapat terlepas dari fungsi OECD sebagai pembentuk identitas. Hal ini terkait dengan identitas yang dibentuk oleh OECD sebagai organisasi internasional terhadap negara anggotanya termasuk Israel sebagai negara yang menganut nilai

dan norma yang diregulasi dalam kerangka OECD. Berdasarkan identitas yang diberikan OECD oleh Israel yang berdampak pada membaiknya reputasi Israel, maka reputasi internasional pada posisi Israel dalam hubungan internasional yang dilihat tidak lagi sebagai negara pelanggar HAM dan negara yang berkonflik dengan negara-negara tetangga saja tetapi juga sebagai negara yang memiliki peran penting dalam ranah internasional.

Identitas yang dimaksud adalah identitas negara anggota OECD sebagai negara maju demokratis yang memiliki perekonomian yang baik serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup nasional maupun global. Untuk memahami bagaimana reputasi Israel mendapat perbaikan dalam OECD, maka analisis terhadap bagaimana posisi Israel dalam hubungan internasional sebelum bergabung dengan OECD maupun setelah bergabung dengan OECD dan hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara lainnya dapat menjadi indikator membaiknya reputasi Israel dalam ranah internasional.

IV.3 Implikasi Bergabungnya Israel dalam OECD terhadap Reputasi Israel

Setelah bergabung dengan OECD, Israel mendapatkan respon yang positif dari negara-negara anggota yang tergabung dalam OECD untuk mendapatkan reputasi yang baik. Reputasi yang baik ini diperlihatkan dengan tidak hanya oleh pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan Israel yang semakin baik di mata dunia yang secara otomatis berimplikasi kepada kepercayaan ranah internasional terhadap kemampuan ekonomi Israel namun juga diikuti dengan rekognisi internasional terhadap Israel. Selain itu, bergabungnya Israel ke dalam

OECD juga diikuti dengan adanya perhatian internasional terhadap konflik Israel dengan negara-negara di Timur Tengah terutama konflik Israel dengan Palestina dan hubungan buruknya dengan negara-negara Arab Muslim.

Salah satu contoh nyata bahwa Israel mendapat rekognisi dari dunia internasional melalui OECD adalah adanya dukungan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Mesir, dan negara yang tergabung dalam Liga Arab lainnya, yang bekerjasama untuk mendorong adanya diskusi di Paris dalam rangka mendukung adanya proses perdamaian antara Israel dan Palestina meski tanpa adanya representasi dari kedua negara yang terlibat konflik baik Israel maupun Palestina melalui forum yang disediakan melalui OECD (Daigle, 2016).

Menurut Perancis, dengan tidak hadirnya representasi dari kedua negara tersebut, diharapkan negosiasi yang berjalan akan lebih kondusif sehingga dapat mencapai target kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault berharap agar negosiasi yang direncanakan ini dapat menjadi jembatan bagi tercapainya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kedua negara tersebut dengan damai (Daigle, 2016).

Meski demikian, pemerintahan Israel menolak pendekatan tersebut dan lebih menyetujui adanya negosiasi secara langsung antara dua pihak yang bersengketa. Dengan kabinet baru yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu ini yang meliputi partai sayap kanan Israel *Our Home Yisrael Beiteinu* menuai kritik yang cukup menjadi permasalahan. Menurut *Global Risk Insight* (2016), kabinet yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu ini makin menyulitkan posisi Israel

karena Menteri Pertahanannya yaitu Avigdor Lieberman dipandang kontroversial dalam memilih posisi dalam perjanjian sebelumnya.

Akan tetapi, Netanyahu membantah kritik itu semua, menurut Netanyahu akan lebih baik jika bertemu dan melakukan diskusi secara langsung karena dapat mengurangi kekhawatiran Israel terhadap kurang diperhatikannya kepentingan nasional Israel berupa keamanan nasional. Meski demikian, keberpihakan politik negara-negara pada dasarnya akan membuat perundingan yang berlangsung semakin rumit. Hal ini membuktikan OECD sebagai organisasi internasional menjadi wadah Israel dalam tatanan dunia internasional, di mana dalam hal ini OECD ikut berperan dalam rangka membantu menciptakan reputasi baik bagi negara-negara anggota OECD lainnya tidak hanya Israel.

Bergabungnya Israel ke dalam OECD pada tahun 2010 menggambarkan kesuksesan diplomatis Israel dalam ranah internasional. Pasalnya, dengan bergabungnya Israel ke dalam OECD, hal ini menggambarkan penerimaan Israel oleh sekelompok negara yang tergabung dalam *'rich's man club'* yang memiliki kemajuan ekonomi yang baik yang dicakup dalam OECD. Hal tersebut juga menggambarkan kemenangan Israel dalam bidang diplomatik setelah berupaya untuk bergabung dalam OECD selama 16 tahun lamanya dan selama itu pula mendapat penolakan dan kritik dari oposisi yang menentang bergabungnya Israel ke OECD atas dasar reputasi Israel dalam konflik Israel – Palestina (Ganley & Federman, 2010).

Penerimaan OECD terhadap Israel pada tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan yang kuat dari Amerika Serikat sebagai aliansi Israel yang

juga merupakan negara *superpower* dalam OECD, terlebih dalam ranah internasional. Penerimaan ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kepercayaan OECD terhadap Israel untuk berkontribusi dalam membentuk arsitektur perekonomian global yang lebih plural dan lebih terbuka, hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Jenderal OECD, yakni Angel Gurría pada tahun 2010 menanggapi masuknya Israel sebagai anggota baru OECD, yang menyatakan bahwa “the new member will contribute to a more plural and open OECD that is playing an increasingly important role in the global economic architecture” (Ganley & Federman, 2010).

Keanggotaan Israel dalam OECD, menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menjabat pada saat tersebut, dapat mendorong hubungan diplomatis Israel di ranah internasional terlepas dari bentuk OECD sebagai organisasi yang bergerak dalam sektor perekonomian (Ganley & Federman, 2010). Hal ini dikarenakan oleh diskusi yang dilakukan dalam OECD juga diskusi berbasis politik meski tidak secara langsung membahas posisi Israel dalam konflik Israel – Palestina.

Sementara, menurut kacamata Israel, keanggotaan Israel ke dalam OECD menandai adanya rekognisi internasional terhadap prestasi ekonomi Israel sekaligus mendorong *credit rating* Israel (Ganley & Federman, 2010). Selain itu, keanggotaan Israel dalam OECD juga dapat juga melampaui permasalahan ekonomi, yakni permasalahan politik. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa Israel sebelumnya seringkali diisolasi secara politik sehingga masuknya Israel ke OECD akan berdampak pada keterbukaan politik Israel dalam ranah internasional.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada saat diterimanya Israel dalam OECD menandakan investasi baru Israel dalam hal diplomatik maupun ekonomi, sehingga pada masa depan, Israel dapat menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia, yang berkembang dari negara kecil yang kemudian mampu membentuk negara dengan *high-tech powerhouse*, perkembangan dalam bidang komunikasi, perangkat lunak, dan teknologi militer.

Meski demikian, keberhasilan Israel dalam bergabung dengan OECD ini tidak dapat dilepaskan dari adanya protes dari Palestina yang mendorong OECD untuk menolak pengajuan Israel sebagai anggota OECD (Ganley & Federman, 2010). Pasalnya, penerimaan OECD terhadap Israel juga disamakan dengan justifikasi okupasi Israel terhadap wilayah Palestina seperti West Bank, dan juga tindakan diskriminatif Israel terhadap masyarakat Arab, yang mana kedua argumen ini mempertanyakan komitmen Israel dalam ranah HAM.

Kondisi Israel setelah bergabung dengan OECD juga harus diikuti dengan keterbukaan Israel untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh OECD. Di sisi lain, Israel juga harus membuka diri untuk mendapatkan pemantauan kebijakan, baik kebijakan ekonomi maupun kebijakan sosial, dari negara anggota OECD lainnya. Dalam hal ini, dari pihak OECD percaya bahwa Israel dapat berperan secara positif terhadap kemajuan OECD.

Menurut Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu (dalam Ravid, 2010), penerimaan OECD terhadap Israel dianggap sebagai '*seal of approval*' yang di mana hal ini dapat menjadi titik kebangkitan Israel dalam dunia internasional. Pasalnya, penerimaan OECD terhadap Israel turut membuka

kesempatan Israel untuk mendapatkan berbagai kesempatan untuk membuka interaksi dalam berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi yang merujuk pada semakin mudahnya investasi asing untuk masuk ke Israel. Berdasarkan kesempatan itu pula, pemerintah Israel juga berupaya untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada dalam negaranya dengan mengadaptasi rekomendasi yang ditawarkan oleh OECD. Selain itu, bergabungnya Israel ke dalam OECD juga menandakan pengakuan internasional terkait kemampuan Israel dalam bidang teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa setelah bergabung dengan OECD, Israel mengalami kemajuan dalam sektor hubungan diplomatik. Dalam hal ini, sebelum masuk ke dalam OECD, Israel cenderung terisolasi baik secara politik maupun diplomatik. Hal ini dikarenakan oleh reputasi Israel yang sebelumnya dipandang negatif akibat tindakannya terhadap Palestina maupun dalam konflik-konflik lainnya. Setelah bergabung dengan OECD, Israel secara otomatis mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai salah satu dari anggota *rich's man club* dan dinilai memiliki identitas layaknya anggota OECD lainnya, yang juga berimplikasi pada hubungan politik Israel secara internasional. Israel dengan demikian mampu semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara di dunia internasional dengan prestasi dalam bidang perekonomian. Di sisi lain, bergabungnya Israel dalam OECD juga memperlihatkan signifikansi Israel di ranah internasional.

BAB V

KESIMPULAN

Bergabungnya Israel ke OECD pada tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari keadaan Israel sebelum diterima keanggotaannya dalam OECD yang dinilai kontroversial. Hal ini diakibatkan oleh buruknya reputasi Israel di ranah internasional khususnya di wilayah Timur Tengah yang disebabkan oleh terlibatnya Israel dalam konflik-konflik bersama dengan negara Arab, terutama dengan Palestina. Selain buruknya reputasi Israel tersebut, Israel juga dianggap belum memenuhi standar karena keadaan ekonomi Israel yang masih tertinggal jauh dari negara-negara anggota OECD lainnya dengan tingginya angka korupsi, rendahnya pendidikan, dan tingginya angka kesenjangan sosial. Kondisi yang demikian menggambarkan bahwa keadaan Israel belum sejalan dengan prinsip-prinsip OECD. Oleh karenanya, kemudian hal ini menimbulkan perhatian terkait bagaimana dampak yang diperoleh Israel setelah bergabung dengan OECD pada tahun 2010.

Untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan teori *rational design* yang bertujuan untuk menelaah tindakan negara dalam organisasi internasional yang didorong oleh adanya insentif-insentif yang disediakan oleh organisasi internasional. Hal ini kemudian tidak dilepaskan dari fungsi-fungsi dalam organisasi internasional di mana dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional secara otomatis menawarkan insentif-insentif yang dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai anggota organisasi internasional. Dalam hal ini, penulis menelaah bahwa terdapat empat fungsi utama organisasi internasional

yang juga diaplikasikan oleh OECD, yakni OECD sebagai media sentralisasi, OECD sebagai institusi yang *independence*, OECD sebagai *enforcer*, dan yang terakhir adalah OECD sebagai pembentuk identitas.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh OECD tersebut, Israel kemudian melihat kesempatan insentif-insentif yang dapat diperoleh Israel jika bergabung dengan OECD. Pada dasarnya, insentif-insentif yang menjadi latar belakang Israel kemudian memutuskan untuk bergabung dengan OECD disesuaikan dengan kepentingan Israel, yakni untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam lingkup nasional maupun di ranah internasional dengan meminimalisasi biaya dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang diaplikasikan OECD. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud merujuk pada permasalahan terkait kepentingan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional, serta permasalahan terkait buruknya reputasi Israel di ranah internasional.

Penulis menemukan bahwa bergabungnya Israel ke dalam OECD jelas memberikan keuntungan berupa terminimalisirnya *transaction cost* yang dibutuhkan Israel untuk berinteraksi dengan negara anggota OECD lainnya secara lebih efisien dan juga akses terhadap informasi terkait dengan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh OECD. Hal ini kemudian berimplikasi secara lebih lanjut terhadap terpenuhinya kepentingan-kepentingan Israel lainnya, yakni kepentingan dalam sektor ekonomi dan sektor sosial.

Meski masih dalam proses perbaikan, penulis menemukan bahwa setelah bergabung dengan OECD selama tiga tahun, tepatnya pada tahun 2013, Israel

telah mengalami kemajuan ekonomi maupun kondisi sosial akibat adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah Israel bersama dengan OECD. Kolaborasi ini berdampak pada pengaplikasian rekomendasi kebijakan-kebijakan yang diberikan OECD oleh Israel. Keuntungan ini muncul sebagai konsekuensi positif dari fungsi OECD sebagai media sentralisasi, sebagai institusi yang *independence*, maupun sebagai *enforcer*.

Di sisi lain, penulis juga menemukan bahwa setelah bergabung dengan OECD, Israel juga mendapat keuntungan dari fungsi OECD berupa fungsi pembentuk identitas. Berdasarkan fungsi ini, keanggotaan Israel dalam OECD mampu mengkonstruksi identitas Israel sebagai bagian dari *rich man's club* yang mana Israel kemudian secara otomatis dianggap memiliki identitas sebagai negara dengan kemajuan ekonomi yang demokratis. Selain itu, dengan bergabungnya Israel dengan OECD, secara tidak langsung Israel dapat memperoleh dukungan dari OECD beserta anggota-anggotanya yang lain.

Bagi Israel, diterimanya pengajuan keanggotaannya oleh OECD, menjadi prestasi Israel yang signifikan dalam dunia diplomatik. Hal ini dikarenakan oleh identitas baru Israel sebagai anggota OECD yang tidak hanya akan mampu memperbaiki reputasi Israel di ranah internasional seiring dengan munculnya pengakuan internasional yang lebih luas terhadap Israel, namun juga dapat memberikan akses yang lebih luas bagi Israel untuk melakukan hubungan diplomatik.

Berdasarkan temuan-temuan penulis tersebut, maka penulis dapat mengkonfirmasi bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis telah terbukti.

Penulis membuktikan bahwasanya terdapat sejumlah dampak positif yang diterima Israel setelah bergabung dengan OECD pada tahun 2010, yakni (1) adanya kepentingan Israel untuk mengurangi *transaction cost* dalam mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya kepentingan dalam sektor ekonomi dan (2) mendorong adanya keterbukaan terhadap hubungan antar negara-negara yang tergabung dalam OECD yang dianggap mampu dapat menguntungkan Israel dalam memperbaiki reputasi Israel dalam ranah internasional, dalam hal ini Israel mampu mendapat pengakuan internasional lebih luas dan mampu membuka hubungan diplomatik secara lebih luas juga.

Berangkat dari penelitian ini, penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat dianalisis mengenai keuntungan-keuntungan lainnya yang dapat diperoleh Israel dengan bergabung dalam OECD maupun organisasi internasional lainnya dengan menganalisis fungsi-fungsi yang dimiliki oleh organisasi internasional secara lebih luas dan terperinci. Selain itu, diperlukan juga pembuktian terkait keuntungan-keuntungan yang diperoleh terkait dengan insentif yang ditawarkan oleh organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dunne, Tim. 2001. *Liberalism: Liberal Institutionalism*, dalam *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations*, 2nd Edition, Oxford University Press.
- Feldman, Marryan. 2014. *Economic Development: A Definition and Model for Investment*. University of North Carolina
- Hart, Chris. 2001. *Doing A Literature Search: A Comprehensive Guide for Social Science*, SAGE Publication Inc, London.
- Keohane, Robert O. 1982. The Demand for Regimes. *International Organization*.
- Mahon, Rianne & McBride, Stephen. 2010. OECD and Transnational Governance.
- Morris, Benny. 1881-2002. *Righteous Victim: A History of The Zionist-Arab Conflict*.
- Reinhart, Tanya. 2002. *How to End The War of 1948 : Israel and Palestine*. Seven Stories Press.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung.
- Silverman, David. 2006. *Interpreting Qualitative Data*, SAGE Publications, London.
- Vienna Convention on Diplomatic Relation. *United Nations Treaty Collection*. United Nations.

Sumber Internet

- Corruption Perception Index. 2013. Israel Corruption Index, dalam <<http://www.transparency.org/research/cpi>> diakses pada 15 September 2015.
- Global Security. No date. Israel – Foreign Relations. Global Security Organization.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/forrel.htm> diakses pada 10 Mei 2016

Kara, Seyfeddan. 2014. Why Israel should not be Allowed to Join OECD, <<https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/912-why-israel-should-not-be-allowed-to-join-the-oecd>> diakses pada 15 September 2015.

Sahar, Liron. (online). 2016. OECD Report: Israel is Corrupt, Poor, and Happy. <<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4760148,00.html>> diakses pada 14 Maret 2016

Artikel Ilmiah

Abbott, Kenneth W & Duncan Snidal, 1998. *Why States Act through Formal International Organizations*, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, No. 1.

Daigle, Brian. 2016. Foreign Ministers Meet To Discuss Israel-Palestine Peace Process. Global Risk Insights.

Ganley, Elaine & Federman, Josef. 2010. Israel Admitted to OECD in Key Diplomatic Victory. The San Diego Union.

Golstein-Galperin, Rita. 2012. Israel and the OECD. Foreign Trade Administration of Israel.

Jackson, James K. 2013. The Organization for Economic Cooperation and Development. Congressional Research Service.

Koremenos, Barbara, et.al. 2001. The Rational Design of International Institution. *International Organization*, 55, 4, Autumn

Marcussen, Martin. 2002. 'The Organization for Economic Cooperation and Development as Ideational Artist and Arbitrator: Reality or Dream?' dalam *Decision Making within International Organization*. Routledge.

Martin, Lisa L. 1992. Interests, Power, and Multilateralism. *International Organization* 46(4)

- Phelan, William. 2009. *State Reputation as Public Goods*. Trinity College Dublin. <<https://www.tcd.ie/iis/documents/discussion/pdfs/iisdp275.pdf>> diakses pada 17 maret 2016
- Porter, Tony & Webb, Michael. 2007. *The Role of the OECD in the Orchestration of Global Knowledge Networks*. Canadian Political Science Association.
- Ravid, Barak. 2010. *OECD Entrance is a Seal of Approval for Israel*. Haaretz.
- Shlaim, Avi & Mohun, Simon. 2010. *Put Condition on Israel OECD entry*. The Guardian.

Laporan Organisasi

- OECD. 2010. *Israel: A Divided Society. Results of A Review of Labour- Market and Social Policy*
- OECD. 2010. *Israel Accession to OECD* dalam <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/israelsaccessiontotheoecd.htm> diakses pada 15 September 2015.
- OECD. 2016. *What We Do and How* dalam <http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow> diakses pada 15
- OECD Observer. (online). 2010. *Israel: Economic Outlook*. <http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3544/A_profile_of_the_Israeli_economy.html> diakses pada 14 Maret 2016
- OECD Observer. (online). 2013. *Israel's Economic Strategy: An Interview with Yuval Steinitz, Minister of Finance of Israel*, dalam *OECD Observer* no. 284 Q1 2011.
- OECD. 2016. *OECD Economic Survey of Israel 2016*. Organization for Economic Cooperation and Development.